

# Panduan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia



ELEANOR CARTER, ARISSETIARSO SOEMODINOTO & ALAN WHITE

# **Panduan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia**

**Eleanor Carter  
Arisetiarso Soemodinoto  
Alan White**

**September 2010**



# Panduan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia

Penyusun:

**Eleanor Carter**, Penasihat Senior, Program Kelautan TNC Indonesia, Bali, Indonesia

**Arisetiarso Soemodinoto**, PhD, Spesialis EPKKL, Program Kelautan TNC Indonesia, Bali, Indonesia

**Alan White**, PhD, Ilmuwan Senior, Program Asia-Pasifik TNC, Honolulu, Hawaii, USA

*Pencantuman yang Disarankan:*

Carter, E., Soemodinoto, A. & White, A. (2010) *Panduan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia*. Bali, Indonesia: Program Kelautan The Nature Conservancy Indonesia, xi + 54 hal.

Dukungan bagi pembuatan dan pencetakan publikasi ini diberikan oleh Badan Administrasi Oseanik & Atmosferik Nasional Amerika Serikat (US-NOAA, *United States National Oceanic and Atmospheric Administration*) (Hibah #NA08NOS4630336) dan Yayasan Ikan & Hidupan Liar Nasional (NFWF, *National Fish & Wildlife Foundation*) (Hibah #18739). Pandangan dan pendapat yang disampaikan disini merupakan pandangan dan pendapat pribadi para penyusun dan tidak selalu mencerminkan pandangan TNC, US-NOAA, dan NFWF, maupun pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, dan pemerintah Kabupaten.

Terbitan ini dapat direproduksi atau disitir dalam terbitan lain dengan ketentuan menyebutkan buku ini sebagai sumber acuan. Panduan ini juga dapat diunduh melalui laman berikut: <http://mpames.coraltrianglecenter.org/> atau dapat diperoleh dari:

The Nature Conservancy – Indonesia Marine Program (TNC-IMP)

Jalan Pengembak No. 2, Sanur 80228, Bali, Indonesia

Telephone (+62-361) 287 272; Facsimile (+62-361) 270 737

ISBN 978-602-97788-0-9 (Bahasa Indonesia)

ISBN 978-602-97788-1-6 (English)

Cetakan pertama (September 2010)

Tata-letak, grafis & pencetakan: PT Redi Pramatana Internusa, Denpasar, Bali, Indonesia

Kredit foto: Andreas Muljadi/TNC-IMP (halaman 23, 46 & sampul belakang), Arisetiarso

Soemodinoto/TNC-IMP (halaman 7), Marthen Welly/TNC-IMP (halaman sampul depan, 1, 4, 21 & 26).

## Daftar Singkatan

CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i> – Konvensi Keanekaragaman Hayati
COP	<i>Conference of the Parties</i>
CTC	<i>Coral Triangle Center</i>
CTI	<i>Coral Triangle Initiative</i> – Prakarsa Segitiga Karang Dunia
CTSP	<i>Coral Triangle Support Program</i> – Program Dukungan Segitiga Karang Dunia
EK/CE	Efek Konservasi ( <i>Conservation Effect</i> )
EP/ME	Efektivitas Pengelolaan ( <i>Management Effectiveness</i> )
IMP	<i>Indonesia Marine Program</i>
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature</i>
KKL/MCA	Kawasan Konservasi Laut ( <i>Marine Conservation Area</i> )
KKLD/DMCA	Kawasan Konservasi Laut Daerah ( <i>District Marine Conservation Area</i> )
Kemehut/MoF	Kementerian Kehutanan ( <i>Ministry of Forestry</i> )
KKP/MMAF	Kementerian Kelautan & Perikanan ( <i>Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i> )
LMMA	<i>Locally-Managed Marine Area</i>
MPA	<i>Marine Protected Area</i>
MPAME(S)	<i>Marine Protected Area Management Effectiveness (System)</i>
NFWF	<i>National Fish and Wildlife Foundation</i>
NOAA	<i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i>
NRC	<i>National Research Council</i>
ONP/NGO	Organisasi Non-Pemerintah/LSM ( <i>Non-Governmental Organization</i> )
(S)EPKKL	(Sistem) Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut
TNC	<i>The Nature Conservancy</i>
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i> – Program Lingkungan PBB
US	<i>United States (of America)</i>
WCMC	<i>UNEP World Conservation Monitoring Centre</i>
WCPA	<i>IUCN World Commission on Protected Areas</i>
WPC	<i>IUCN World Parks Congress</i> – Kongres Taman Nasional Dunia
WSSD	<i>World Summit on Sustainable Development</i>
Z/KLA (NTZ/A)	Zona/Kawasan Larang Ambil ( <i>No Take Zone/Area</i> )

## Daftar Isi

<b>Daftar Singkatan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>vi</b>
<b>Prakata</b> .....	<b>ix</b>
<b>Sambutan: Direktur Konservasi Kawasan, Kemenhut</b> .....	<b>x</b>
<b>Sambutan: Direktur Konservasi Kawasan &amp; Jenis Ikan, KKP</b> .....	<b>xi</b>
<b>1. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1. Apakah Efektivitas Pengelolaan? .....	3
<b>2. Langkah-Langkah untuk Melaksanakan Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL</b> ..	<b>5</b>
<b>3. Melakukan Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL</b> .....	<b>8</b>
LANGKAH 1: Mengidentifikasi anggota dan membentuk tim peninjau .....	8
LANGKAH 2: Mengumpulkan informasi latar tentang KKL yang ditinjau .....	10
LANGKAH 3: Mengumpulkan data hasil pemantauan .....	10
LANGKAH 4: Membangun dan memelihara database KKL .....	11
LANGKAH 5: Melengkapi Lembar Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL.....	12
3.1. Menentukan Tingkat Pengelolaan suatu KKL.....	14
3.2. Menentukan peringkat Efek Konservasi .....	16
3.3. Perbedaan antara Tingkat Pengelolaan & peringkat Efek Konservasi .....	21
3.4. Fitur-fitur lain pada Kartuskor .....	21
3.5. Rentang waktu untuk melakukan tinjauan .....	23
<b>4. Langkah Selanjutnya: Setelah Tinjauan</b> .....	<b>25</b>
4.1. Menangani jawaban 'Tidak' .....	25
4.2. Menangani jawaban 'Tidak Tahu' .....	25
4.3. Seberapa sering tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL perlu dilakukan? .....	26
<b>5. Rangkuman</b> .....	<b>27</b>
<b>Kepustakaan</b> .....	<b>28</b>
<b>Lampiran</b>	
<b>Lembar Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL</b> .....	<b>30</b>
<b>Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL: Hasil Akhir Kartu Skor</b> .....	<b>51</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangkakerja konseptual Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (EPKKL) .....	6
Gambar 2. Tampilan grafis pemeringkatan Tingkat Pengelolaan.....	15
Gambar 3. Model konseptual keterkaitan antara 'implementasi' dan 'efek konservasi'.....	19
Gambar 4. Contoh kolom 'Indikator dan Pengumpulan Data' .....	23

## Daftar Tabel

Tabel 1. Kawasan Konservasi Laut di Indonesia .....	2
Tabel 2. Pertimbangan tentang pelibatan peninjau internal <i>versus</i> eksternal.....	9
Tabel 3. Contoh penghitungan persentase untuk menentukan Tingkat Pengelolaan KKL.....	14
Tabel 4. Contoh hasil penghitungan semua tabel untuk menentukan Tingkat Pengelolaan ....	15
Tabel 5. Definisi dan contoh dari empat kriteria konservasi.....	17

## Ucapan Terima Kasih

Proyek “Memprakarsai Sistem Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia” (*Initiating a Marine Protected Area Management Effectiveness System (MPAMES) in Indonesia*) yang mengerucut kepada penerbitan Panduan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari beragam perorangan dan lembaga yang berkepentingan dengan pengembangan dan pengelolaan KKL di Indonesia.

Kami khususnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Subdit Lahan Basah, Konservasi Laut & Ekosistem Esensial, Direktorat Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan, Ibu Ir. Cherryta Yunia, M.M., dan Kepala Subdit Rehabilitasi Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Kawasan & Jenis Ikan, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan & Perikanan, Ibu Ir. Ahsanal Kasasiah, M.Agr.Bus., atas dukungannya bagi pengembangan dan pembuatan Panduan ini. Panduan ini dikembangkan dan dipertajam melalui uji-lapangan dan lokakarya yang melibatkan mitra-mitra baik pemerintah mau pun non-pemerintah. Perencanaan awal proyek ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari Rili Djohani (mantan Direktur TNC Program Indonesia) dan Abdul Halim (Direktur Program Kelautan, TNC Indonesia), dan Stacey Kilarski (mantan Teknisi Kelautan, Prakarsa Kelautan Global TNC) yang telah memberikan sumbangan signifikan pada versi-versi awal Panduan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peninjau Panduan berikut atas masukan-masukan yang diberikan: Lynne Zeitlin Hale, Direktur, Prakarsa Kelautan Global TNC; Rudyanto, Manajer Portfolio CTSP, Program Kelautan, TNC Indonesia; Andrew Harvey, mantan Manajer Konservasi, PT Putri Naga Komodo; dan Sangeeta Mangubhai, PhD, Manajer Portfolio Raja Ampat, Program Kelautan TNC Indonesia.

Para penyusun sangat berterima kasih untuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang telah berpartisipasi, dan badan-badan pengelola KKL yang dikunjungi selama pelaksanaan proyek. Meski kami telah berusaha untuk mencantumkan semua orang yang telah memberikan sumbangannya kepada proyek ini, harus kami akui mungkin ada satu dua orang yang namanya terlewatkan dan tidak kami cantumkan di sini, kami minta maaf untuk hal ini. Daftar orang-orang yang diwawancarai atau berpartisipasi pada diskusi kelompok fokus selama uji-lapangan di Taman Nasional Wakatobi, Kawasan Konservasi Laut Berau, dan Taman Nasional Bali Barat, atau pada lokakarya disajikan di bawah ini.

### **Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Uji Lapangan, 2009)**

Errys Maart, Kepala Bagian Tata Usaha  
La Ode Ahyar TM, Kepala Seksi 1  
Untung Suripto, Kepala Seksi 2  
Union, Staf Seksi Perencanaan  
Ayub Poli, Staf Seksi Perencanaan  
Syahrudin, Jagawana Seksi 1  
Putu Suastawa, Jagawana Seksi 1  
Ramli, Jagawana Seksi 1  
Made Lakompi, Jagawana Seksi 1  
La Ode Orba, Jagawana Seksi 1  
Sofian, Jagawana Seksi 1  
Rolan Budhianto, Jagawana Seksi 1  
La Ode Kasma, Jagawana Seksi 1  
La Ode Sahari, Jagawana Seksi 2  
Muhammad Desna, Jagawana Seksi 3

### **Lokakarya Protokol Efektivitas Pengelolaan KKL, Bali (2009)**

La Ode Ahyar TM, Taman Nasional Wakatobi  
Muhammad Desna, Taman Nasional Wakatobi  
Cherryta Yunia, Kepala Sub-Direktorat, Kementerian Kehutanan  
Irfan Yulianto, Perencana KKL, Program Kelautan WCS Indonesia  
Yudi Herdiana, Staf SIG, Program Kelautan WCS Indonesia  
Stuart Campbell, PhD, Direktur, Program Kelautan WCS Indonesia  
Sudarsono Kimpul, Manajer Portfolio, Program Kelautan WWF Indonesia

Purwanto, Koordinator Pemantauan, Program Bersama TNC-WWF di Wakatobi  
Nina Dwisasanti, Kepala Proyek, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
Audrie J.S., Koordinator Pemantauan, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
Andrew Harvey, Manajer Konservasi, PT Putri Naga Komodo  
Hery Yusamandra, Koordinator Pemantauan, PT Putri Naga Komodo  
Anton Wijonarno, Perencana Konservasi, Proyek Laut Sawu TNC  
Marthen Welly, Kepala Proyek, Proyek Nusa Penida TNC  
Johanes Subijanto, Manajer Portfolio Sunda Kecil, Program Kelautan TNC Indonesia  
Juliana Tomasouw, Koordinator Dukungan Program, Program Kelautan TNC Indonesia

**Kawasan Konservasi Laut Berau, Kalimantan Timur (Uji Lapangan, 2009)**

Nina Dwisasanti, Kepala Proyek, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
Audrie J.S., Koordinator Pemantauan, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
Sonny Tasidjawa, Staf Pemantauan, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
Abid Giffari, Staf Penjangkauan, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
Candika Yusuf, Staf Perikanan, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
Dwi Basuki Rahmad S., Staf Penjangkauan, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
Andi Erson, Ketua JAMAN (Jaringan Masyarakat Nelayan Berau)  
H. Anwar, Kepala Kantor Kelautan & Perikanan, Kabupaten Berau  
Muhammad Zaidi, Kepala Kantor KSDA Seksi Berau  
Ali Machfudhi, Staf, Kantor KSDA Seksi 1 Berau

**Taman Nasional Bali Barat, Bali (Uji Lapangan, 2010)**

P. Bambang Darmadja, Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat  
Ktut Catur Merbawa, Kepala Seksi 1  
Ngurah Agus Krisna, Kepala Seksi 3  
Joko Waluyo, Staf  
Made Enoch Idris, Pengawas Ekosistem Hutan/Laut  
Ipung Pamungkas, Staf  
Juni Wahyono, Staf  
I Ktut Mertha Yasa, Staf  
I Gusti Bagus Ngurah Suranggana, Staf  
Sugiarto, Staf  
Ganda Diasra Utara, Staf  
I Made Mudana, Jagawana  
IPG Arya Kusdyana, Staf  
Nana Rukmana, Staf  
Ruhama Reza Ramdhan, Pengawas Ekosistem Hutan/Laut

**Lokakarya Nasional Panduan EPKKL, Bali (2010)**

Wahju Rudianto, Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi  
Veda Santiadji, Kepala Proyek, Program Bersama TNC-WWF di Wakatobi  
Ali Machfudhi, Staf KSDA 1 Berau, Kalimantan Timur  
Suparno Kasim, Asisten II Bupati Berau, Kalimantan Timur  
H. Anwar, Kepala DKP Kabupaten Berau, Kalimantan Timur  
Abidzar Ghiffari, Staf Penjangkauan, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
Rusli Andar, Staf Penjangkauan, Program Bersama Kelautan TNC-WWF di Berau  
P. Bambang Darmadja, Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat  
Ganda Diasra Utara, Staf Balai Taman Nasional Bali Barat  
Hirmen Sofyanto, Kepala Proyek, Program Pengembangan Taman Nasional Laut Sawu  
Sonny Partono, Direktur Konservasi Kawasan PHKA, Kementerian Kehutanan  
Cherryta Yunia, Kepala Subdit LBKLEE, Dit. KK PHKA, Kementerian Kehutanan  
Irawan Asaad, Staf Subdit LBKLEE, Dit. KK PHKA, Kementerian Kehutanan  
Ahsanal Kasasiah, Kepala Subdit Rehabilitasi Kawasan Konservasi, Dit. KKJI, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP)  
Suraji, Kepala Seksi Konservasi Kawasan Laut, Direktorat KKJI, Ditjen KP3K, KKP  
Tommy Hermawan, Asisten Deputi Bidang Kelautan & Perikanan, BAPPENAS  
Andi Niartiningsih, Dekan, Fakultas Ilmu Kelautan & Perikanan, UNHAS Makassar  
Johannes Hutabarat, Dekan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan, UNDIP Semarang



Neviaty P. Zamani, Pengajar, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan, IPB Bogor  
Jotham Ninef, Pengajar, Fakultas Pertanian, UNDANA Kupang  
Darmawan, Pejabat Senior, Sekretariat Regional CTI, Jakarta  
Hery Yusamandra, Koordinator Pemantauan, PT Putri Naga Komodo  
Laure Katz, Conservation International Indonesia Marine Program, Bali  
Crissy Huffard, Conservation International Indonesia Marine Program, Bali  
Mark Infield, Direktur Regional Asia Pasifik, Fauna-Flora International, Bali  
Gayatri Lilley, Direktur, Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI), Bali  
Putu Widyastuti, Manajer Program, LINI, Bali  
Irfan Yulianto, Perencana KKL, Program Kelautan WCS Indonesia, Bogor  
Creusa (Tetha) Hitipeuw, Program Kelautan WWF Indonesia, Bali  
Abdul Halim, Direktur, Program Kelautan TNC Indonesia (TNC-IPK), Bali  
Johannes Subijanto, Manajer Portfolio Sunda Kecil, TNC-IPK Bali  
Sangeeta Mangubhai, Manajer Portfolio Kepala Burung, TNC-IPK Bali  
Marthen Welly, Kepala Proyek, Program Pengembangan KKP Nusa Penida, TNC-IPK Bali  
Wira Sanjaya, Staf Penjangkauan, Program Pengembangan KKP Nusa Penida, TNC-IPK Bali  
Andreas Muljadi, Koord. Monitoring, Program Pengembangan KKP Nusa Penida, TNC-IPK Bali  
M. Imran Amin, Koordinator Kebijakan Kelautan, TNC-IPK Bali  
Juliana Tomasouw, Koordinator Dukungan Program, TNC-IPK Bali  
Hesti Widodo, Spesialis Kampanye Pendidikan Konservasi, TNC-IPK Bali

**Program Kelautan TNC Indonesia, Kantor Bali**

Juliana Tomasouw, Koordinator Dukungan Program  
Kadek Ayu Noviantini, Staf Operasi  
Nyoman Suardana, Staf Database Konservasi  
Risal Pramana, Staf Logistik  
Monica Louise P., Akuntan  
Hesti Widodo, Spesialis Kampanye Pendidikan Konservasi  
Tri Soekirman, Manajer Komunikasi

Panduan ini dapat diselesaikan dengan masukan konstruktif dari banyak orang/pihak. Sekiranya masih dijumpai kesalahan atau pendapat yang tidak dapat diterima, hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab para penyusun.

## Prakata

Ancaman terhadap lingkungan laut dan pesisir di Indonesia dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara tidak pernah setinggi sekarang. Ancaman tersebut berasal dari pertumbuhan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan tergantung kepada sumberdaya pesisir sebagai sumber makanan dan pendapatan, beragam dampak dari pembangunan terhadap ekosistem pesisir, dan permintaan internasional terhadap komoditas laut dan perdagangan barang & layanan terkait dengannya, dan, kini, dampak tertunda dari perubahan iklim baik terhadap ekosistem maupun masyarakat manusia. Ancaman-ancaman ini dan dampak yang ditimbulkannya menekankan perlunya pengelolaan dan konservasi kawasan, ekosistem dan sumberdaya pesisir dimana masyarakat tergantung kepadanya. Salah satu dari strategi kunci yang sedang dipromosikan di seluruh Indonesia dan kawasan sekitarnya untuk menjawab masalah ini adalah dengan merancang dan mendirikan kawasan-kawasan konservasi laut (KKL) dan jejaring KKL.

KKL dimulai di Indonesia pada dekade 1970an dengan dideklarasikannya beberapa taman nasional laut. Sejak itu, jumlah KKL yang didirikan meningkat dan telah mencapai 153 KKL yang meliputi lebih dari 17 juta hektare habitat, perairan laut dan kawasan pesisir yang dilindungi dan dikelola secara legal<sup>1</sup>. Cakupan KKL yang luas ini tentunya patut mendapat pujian mengingat begitu luas dan melimpahnya kawasan dan sumberdaya pesisir di dalam wilayah kepulauan Indonesia. Meskipun demikian, luasnya kawasan KKL yang sudah didirikan secara legal tidak otomatis mencerminkan perlindungan konservasi yang sebenarnya kecuali kawasan tersebut dikelola secara efektif. Pertanyaannya kemudian, bagaimana status (ekologi) dari luasan kawasan laut yang berada di bawah perlindungan legal ini?

Sayangnya, jawabannya, berdasarkan pengetahuan dan pengamatan saat ini, adalah bahwa status dari habitat dan ekosistem laut di dalam *sebagian besar* KKL di Indonesia tidak jauh berbeda dari habitat dan ekosistem di kawasan-kawasan serupa yang berada di luarnya. Selain itu, banyak KKL yang hampir atau sama sekali tidak memiliki badan pengelola. Sejauh ini tidak ada data tersedia yang benar-benar mengkuantifikasi dan mengkategorisasi tingkat efektivitas pengelolaan KKL di Indonesia. Oleh karenanya, terbitan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan tentang 'efektivitas' dan sekaligus untuk memberikan proses pengukuran efektivitas KKL secara berulang yang sistematis di seluruh Indonesia.

**Panduan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (EPKKL) di Indonesia** ini menyajikan perangkat yang sederhana sekaligus kompak untuk mengkaji bagaimana sebuah KKL melakukan peran-peran pengelolaan dan perlindungannya. Meski KKL yang berbeda-beda didirikan untuk tujuan/keperluan berbeda pula, Panduan ini dapat digunakan untuk mengkaji KKL di mana pun di dalam wilayah Indonesia. Selain untuk memberikan cara yang mudah untuk mengkaji kemajuan atau masalah yang dihadapi oleh suatu KKL, Panduan ini juga merupakan sebuah perangkat pembelajaran. Panduan ini memberikan cara yang sistematis bagi para perencana, pengelola, pemangku-kepentingan KKL dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk menentukan hal-hal apa sajakah yang sudah dicapai oleh sebuah KKL dan hal-hal apa sajakah yang belum atau perlu lebih diperhatikan demi mencapai pengelolaan KKL yang lebih efektif.

Hasilnya akan sangat berguna untuk memperbaiki atau meningkatkan pengelolaan pada skala lokal disamping juga memberikan panduan tentang jenis-jenis bantuan yang diperlukan dan dimana memperolehnya melalui badan-badan pemerintah atau para mitra dalam merencanakan dan mengelola KKL. Akhir kata, besar harapan Panduan ini dapat digunakan secara luas untuk memperbaiki dan meningkatkan status KKL-KKL di Indonesia.

Mari kita mulai!

---

<sup>1</sup> *Dalam Pengembangan, 2010: Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis dan Pengelolaan Kawasan-Kawasan Lindung; Indonesia: Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, didukung oleh Kemitraan Dukungan Implementasi Nasional (National Implementation Support Partnership, NISP).*



## Sambutan

Direktur Konservasi Kawasan  
Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  
Kementerian Kehutanan

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumberdaya pesisir dan laut yang luas dan maha kaya. Meski pun demikian, sumberdaya pesisir dan laut ini terancam oleh beragam kegiatan manusia, fenomena alam dan dampak jangka-panjang dari efek perubahan iklim. Mengingat pentingnya sumberdaya pesisir dan laut bagi pembangunan jangka-panjang berkelanjutan Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk menetapkan lingkungan pesisir dan laut seluas 10 juta hektare pada tahun 2010 dan 20 juta hektare pada tahun 2020 untuk keperluan konservasi laut. Upaya ini telah menunjukkan hasilnya, terbukti dari dicapainya sasaran tahun 2010 yang melebihi target (13 juta hektare) setahun lebih awal pada tahun 2009, dan saat ini kita sedang berupaya untuk mencapai sasaran tahun 2020 dengan mendirikan sebanyak mungkin kawasan konservasi laut di seluruh negeri.

Meski pun demikian, menetapkan kawasan laut sudah terlindungi saja tidak secara otomatis akan mencapai pelestarian yang diinginkan, sehingga muncul sebuah pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL) di Indonesia: "Apakah KKL yang kita dirikan sudah dikelola dengan efektif untuk mencapai tujuan secara lestari?" Menjawab pertanyaan ini adalah suatu keharusan bagi kita. Pertama, bila kita mampu menjawab pertanyaan ini berarti memungkinkan kita untuk memiliki informasi yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah kepada rakyat Indonesia sebagai penerima-manfaat langsung, alasan dibuatnya kebijakan untuk melindungi dan mengelola lingkungan pesisir dan laut Indonesia. Kedua dan sama pentingnya, kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa sebagai salah satu negara yang terletak tepat di jantung kawasan Segitiga Karang, mampu mengelola dan melindungi terumbu karang kita secara efektif demi menyumbang kepada Bumi yang berkelanjutan dan mampu menopang kehidupan masyarakat demi keamanan pangan.

Kehadiran Panduan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan KKL ini memang sudah waktunya, dan kami menyambut baik upaya untuk membantu dan memperkuat segala upaya kita untuk melindungi dan mengelola KKL dan jejaringnya di Indonesia.

Besar harapan kami Panduan ini akan segera diterapkan oleh para perencana, pengelola dan pemangku-kepentingan KKL, LSM dan kelompok pemerhati lingkungan secara transparan dan berkesinambungan yang diperuntukan bagi peningkatan pengembangan dan pengelolaan KKL-KKL kita. Panduan ini akan disebarluaskan, disosialisasikan dan diadaptasikan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola KKL yang akan digunakan dan diacu dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dan perlindungan KKL (kawasan pelestarian alam laut, kawasan suaka alam laut, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan lain sebagainya) guna pengelolaan yang lebih baik.

Jakarta, Mei 2010.

Ir. Sonny Partono, M.M.



## Sambutan

Direktur Konservasi Kawasan & Jenis Ikan  
Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
Kementerian Kelautan & Perikanan

Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya naskah "Panduan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia" dapat disusun dengan baik. Apresiasi ini kami berikan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun yang terdiri dari: Saudari Eleanor Carter, Saudara Arisetiarso Soemodinoto, dan Saudara Alan White dengan dukungan The Nature Conservancy (TNC).

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumberdaya pesisir dan laut yang luas dan maha kaya. Meskipun demikian, beragam ancaman khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, fenomena alam serta perubahan iklim berdampak pada keberlanjutan sumberdaya tersebut. Mengingat pentingnya sumberdaya pesisir dan laut bagi pembangunan jangka-panjang berkelanjutan Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk menetapkan kawasan konservasi perairan seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Upaya ini telah menunjukkan hasilnya, terbukti dengan tercapainya lebih dari 13 juta hektar kawasan konservasi perairan pada tahun 2010.

Naskah "Panduan Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia" ini sangat penting untuk dijadikan dasar dihasilkannya sebuah pedoman pengukuran efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Hal ini juga mengingatkan belum adanya pendekatan khusus untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan khususnya di laut. Oleh karena itu, kami menyambut baik upaya-upaya untuk mendukung dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi laut dan jejaringnya di Indonesia.

Walaupun naskah panduan ini masih memerlukan banyak penyempurnaan, kiranya naskah ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pembuat keputusan sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, sehingga tahapan program dan kegiatan pengelolaan selanjutnya di kawasan konservasi yang telah diukur/dinilai dapat diidentifikasi dan ditetapkan guna keberlanjutannya.

Besar harapan kami naskah panduan ini dapat dipelajari dengan baik dan diberikan masukan oleh pihak-pihak terkait, sehingga penyempurnaannya oleh para penulis dapat segera diwujudkan.

Terima kasih.

Jakarta, September 2010

Ir. Agus Dermawan, M.Si.

# 1. Pendahuluan

Laut dan pesisir merupakan ekosistem yang sangat produktif dan menyediakan beragam barang dan layanan yang mendukung masyarakat dan kegiatan ekonomi, mencakup ketahanan pangan, air laut yang bersih, peluang rekreasi serta beragam manfaat lainnya. Seyogianya sumberdaya laut yang sehat membutuhkan ekosistem yang sehat dan utuh. Sayangnya, ekosistem-ekosistem laut dan pesisir di seluruh dunia sedang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. Penurunan produktivitas, keanekaragaman hayati dan ekosistem-ekosistem laut, diimbuh dengan peningkatan jumlah penduduk dan ketergantungan terhadap layanan yang diberikan oleh laut, telah mendorong perlunya meningkatkan perhatian dan upaya untuk melindungi dan mengelola ekosistem-ekosistem laut secara efektif. Dalam menanggapi perlunya melakukan upaya-upaya konservasi, di seluruh dunia telah didirikan banyak Kawasan Konservasi Laut (KKL, atau *Marine Protected Area, MPA*), dan, baru-baru ini, jejaring KKL.

Pelindungan berbasis-luasan melalui KKL ini dapat membantu memelihara kesehatan dan produktivitas ekosistem, disamping menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Keberadaan KKL juga dapat membantu memelihara kisaran penuh variasi genetik yang sangat penting untuk mengamankan populasi-populasi species kunci, memberlanjuti proses-proses evolusi dan menjamin daya-pulih (*resilience*) mereka dalam menghadapi gangguan alami dan pemanfaatan oleh manusia (IUCN, 1999; NRC, 2001; Agardy & Wolfe, 2002; Agardy & Staub, 2006; Mora *et al.*, 2006; Parks *et al.*, 2006; IUCN-WCPA, 2008).

Bila dirancang dengan benar dan dikelola secara efektif, KKL memainkan peranan penting dalam melindungi ekosistem dan, pada beberapa kasus, dalam peningkatan atau perbaikan perikanan pesisir dan laut (IUCN-WCPA, 2008). Karena peran ini, beragam lembaga dan badan pemerintah dan publik meletakkan harapan yang tinggi kepada KKL dalam memelihara atau memulihkan fungsi-fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati laut, disamping untuk meningkatkan kondisi sosio-ekonomi sebagai hasil dari peningkatan produksi perikanan yang meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan (Parks *et al.*, 2006). Meskipun demikian, seringkali harapan badan-badan pemerintah dan publik tentang apa yang bisa diberikan oleh KKL tidak realistis, dikarenakan oleh pemberitaan sensasional tentang manfaat KKL bagi masyarakat pesisir (Agardy & Wolfe, 2002; Parks *et al.*, 2006).

Komitmen internasional bagi pengembangan dan pengelolaan efektif KKL dimulai pada dekade 1980an ketika Sidang Umum IUCN ke-17 memanggil semua bangsa-bangsa dunia untuk “mendirikan suatu sistem kawasan perlindungan laut (*marine protected areas, MPAs*) global”<sup>2</sup>. Para delegasi pada Kongres Taman Nasional Sedunia (*World Parks Congress, WPC*) tahun 1992 mendukung panggilan untuk “mendirikan jejaring global kawasan perlindungan laut” tersebut<sup>3</sup> dan diperkuat lebih jauh lagi pada Pertemuan Puncak Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development, WSSD*) tahun 2002 dimana para pemimpin dunia berkomitmen kepada sasaran “berdirinya jejaring kawasan perlindungan laut pada tahun 2012”<sup>4</sup> dengan menambahkan bahwa pendirian tersebut seyogianya berdasarkan informasi saintifik dan konsisten dengan hukum internasional.

---

<sup>2</sup>Rekomendasi 17.38 – Sidang Umum IUCN ke-17, San Jose, Costa Rica, 1988.

<sup>3</sup>Rekomendasi 11 – Kongres Taman Nasional Sedunia ke-4, Caracas, Venezuela, 1992.

<sup>4</sup>Rencana Aksi WSSD 2002, 54 hal.

Definisi KKL oleh IUCN (1999) yang umum disepakati adalah:

“Suatu kawasan pasang-surut atau selalu-terendam, bersama dengan badan air yang melingkupinya dan flora & fauna dan penampakan budaya dan sejarah di dalamnya, yang dicadangkan melalui hukum atau cara efektif lainnya untuk melindungi sebagian atau semua lingkungan yang terlingkup di dalamnya.”<sup>5</sup>

Pada tahun 2003 WPC menggunakan sasaran ini untuk memberikan rekomendasi bahwa kawasan-kawasan yang dilindungi dalam KKL seyogianya ‘sangat ditingkatkan’<sup>6</sup> dan menyarankan bahwa jejaring KKL “seyogianya ekstensif dan meliputi kawasan-kawasan sangat terproteksi dengan jumlah paling tidak 20-30% dari setiap [jenis] habitat”<sup>7</sup>. COP-7 Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity, CBD*) pada tahun 2004 juga merekomendasikan bahwa pada tahun 2012 semua negara penandatanganan seyogianya sudah memiliki suatu sistem KKL nasional dan regional yang komprehensif, dikelola secara efektif dan secara ekologi merepresentasikan pelestarian paling tidak 10% dari semua wilayah ekologi (*ecoregion*) laut dan pesisir dunia<sup>8</sup>.

**Tabel 1. Kawasan Konservasi Laut di Indonesia**

Fungsi	Kategori IUCN	Luas (hektare)
Cagar Alam	Ia/Ib	226,290
Cagar Alam Laut		421,907
Taman Nasional	II	528,403
Taman Nasional Laut		7,455,959
Suaka Margasatwa	IV	249,015
Suaka Margasatwa Laut		275,831
Taman Buru	V	5,843
Taman Hutan Raya		1,621
Taman Rekreasi Alam		5,008
Taman Rekreasi Alam Laut		755,431
Kawasan Konservasi Laut Daerah	VI	7,343,135
Kawasan laut dilindungi total		17,268,445

Sumber: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan & Perikanan, didukung oleh Kemitraan Dukungan Implementasi Nasional. Pemrosesan data spasial untuk laporan “Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis dan Pengelolaan Kawasan-Kawasan Lindung” kepada CBD (dalam pengembangan).

Meski demikian, hanya 0,08% samudera Bumi dan 0,2% dari keseluruhan wilayah laut di bawah yurisdiksi nasional yang dilindungi dengan ketat dimana pemanfaatan ekstraktif dilarang (Wood, 2007). Luasan tersebut jelas masih jauh dari tujuan-akhir melindungi 30% habitat laut secara efektif. Lebih jauh lagi, banyak pemerintah, profesional dan pengelola KKL menyadari bahwa upaya pengelolaan KKL saat ini secara umum tak-efektif, sehingga tidak mencapai perlindungan habitat yang sebenarnya diinginkan (Kelleher *et al.*, 1995; Pomeroy *et al.*, 2004; Mora *et al.*, 2006). Banyak yang khawatir dan menganggap bahwa sebagian besar KKL yang ada di seluruh dunia pada dasarnya hanyalah merupakan suatu penerapan legislatif, buruk dalam hal penegakan pengelolaannya, dan tidak memberikan perlindungan yang efektif (oleh karenanya disebut “taman nasional kertas”) (Parks *et al.*, 2006). Pada tingkat internasional, hal ini telah mendorong perlunya melakukan tinjauan dan memahami

<sup>5</sup>Saduran bebas dari definisi Marine Protected Area: “any area of the intertidal or subtidal terrain, together with its overlying water and associated flora, fauna, historical and cultural features, which has been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment” (IUCN, 1999)

<sup>6</sup>Rekomendasi 4.1 (h) – Kongres Taman Nasional Sedunia ke-5, Durban, Afrika Selatan, 2003.

<sup>7</sup>Rekomendasi 22.1 (a) – Kongres Taman Nasional Sedunia ke-5, Durban, Afrika Selatan, 2003.

<sup>8</sup>Goal 1, Target 1.1 – CBD COP-7, Kuala Lumpur, 2004.

sejauh mana upaya pengelolaan KKL berjalan secara efektif dan memenuhi tujuan-tujuannya serta bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KKL (Hockings *et al.*, 2000, 2006; Parks *et al.*, 2006).

Lebih dari 17 juta hektare di Indonesia telah dinyatakan sebagai kawasan konservasi laut (Tabel 1), dan angka ini sebetulnya telah melebihi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menyisihkan 10 juta hektare lingkungan laut Indonesia pada tahun 2010 untuk keperluan konservasi (UNEP-WCMC, 2008), dan kini sedang bergerak maju untuk mencapai komitmen baru untuk mendirikan 20 juta hektare KKL pada tahun 2020<sup>9</sup>. Disamping itu, ditekankan bahwa pendirian KKL-KKL ini perlu disertai dengan ‘pengelolaan yang efektif’ dan Indonesia juga memiliki perspektif yang sama dalam hal ini. Menteri Kelautan & Perikanan, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia “... telah berkomitmen untuk mendukung *pengelolaan efektif* KKL dan jejaringnya bekerjasama dengan para pemangku-kepentingan.” Disamping itu, “... di tahun-tahun mendatang, kita akan memfokuskan upaya untuk menjamin bahwa kawasan-kawasan konservasi laut di Indonesia *dikelola dengan benar dan efektif*, untuk menjamin bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dapat dengan abadi menikmati manfaat dari lautan ini.”<sup>10</sup> Pada Rencana Aksi Nasional tentang Prakarsa Segitiga Karang (Aksi 9), dinyatakan komitmen untuk “membangun dan mengadopsi cara, bakuan, kriteria dan indikator yang sesuai untuk *mengevaluasi efektivitas pengelolaan dan tata-kelola KKL*”; dan untuk “*melaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan* terhadap paling tidak 30% KKL yang ada di Indonesia.”

Pengembangan Panduan ini dilakukan dengan mengambil pengalaman dari negara-negara lain dengan mengadaptasikan aspek dan proses yang sesuai dengan konteks Indonesia. Bahan-bahan yang diacu Panduan ini meliputi *How is your MPA doing?...* (Pomeroy *et al.*, 2004), *A Workbook for Assessing Management Effectiveness of MPAs in the Western Indian Ocean* (Wells & Mangubhai, 2007), dan *Scorecard to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for MPAs* (Staub & Hatzios, 2004), dan terutama Sistem Database dan Pemingkatan KKL yang diadopsi dan berfungsi di Filipina (White *et al.*, 2006). Draf awal Panduan ini telah diujicobakan di tiga KKL, yaitu Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kawasan Konservasi Laut Berau (Kalimantan Timur), dan Taman Nasional Bali Barat (Bali). Hasil ujicoba lapangan juga dipertajam melalui pembahasan dan disetujui melalui dua lokakarya, satu di tingkat regional dan satu di tingkat nasional. Kini, dengan penerbitannya, Panduan ini siap untuk diterapkan di lebih banyak KKL di Indonesia.

## 1.1. Apakah Efektivitas Pengelolaan?

Efektivitas pengelolaan adalah “tingkat sejauh mana kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh suatu KKL” (Hockings *et al.*, 2000, 2006). Pada setiap KKL, ada beragam hal, seperti faktor-faktor biofisik, tata-kelola dan sosio-ekonomi, yang dapat secara langsung mau pun tidak-langsung mempengaruhi kinerja pengelolaan secara menyeluruh, dan tingkat sejauh mana KKL yang sedang dikelola dapat, pada gilirannya, mempengaruhi perubahan pada beberapa atau semua faktor terkait (Parks *et al.*, 2006). Jadi, proses untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan melibatkan tinjauan terhadap tiga faktor (biofisik, sosio-ekonomi dan tata-kelola) yang mempengaruhi pengelolaan kawasan.

Tinjauan berulang terhadap efektivitas pengelolaan juga dapat membantu para pengelola untuk mendokumentasikan kinerja upaya-upaya pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan KKL dan memberikan gambaran tentang kemajuannya kepada para pengambil-keputusan dan pemangku-kepentingan (Pomeroy *et al.*, 2004). Lebih jauh lagi, pelibatan

---

<sup>9</sup>Pertemuan Puncak Prakarsa Segitiga Karang: Pidato Pembukaan dan Utama oleh Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Manado, 15 Mei 2009.

<sup>10</sup>Halaman 1 & 3, Pidato Utama pada Deklarasi Taman Nasional Laut Sawu, Laksdya (Purn) Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Manado, 13 Mei 2009.

masyarakat dalam proses tinjauan juga akan memperkuat dukungan publik dan membangun rasa saling-percaya. Ketika hasil tinjauan KKL dibagi kepada publik, hal ini disamping akan meningkatkan kejelasan dan kredibilitas tim KKL, juga mengarah kepada meningkatnya dukungan publik terhadap KKL.

Tinjauan juga memfasilitasi peningkatan pengelolaan KKL melalui pembelajaran, penerapan strategi adaptif, dan identifikasi tantangan-tantangan spesifik yang mempengaruhi apakah tujuan-tujuan KKL sedang dicapai. Pengelolaan KKL secara efektif memerlukan tinjauan periodik terhadap kemajuan proyek dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang telah dinyatakan, selain juga penggunaan secara aktif temuan-temuan tinjauan untuk melaksanakan pengelolaan secara adaptif. Konsep pengelolaan adaptif melibatkan suatu proses daur iteratif dimana para pengelola dapat meninjau (ulang) asumsi-asumsi pengelolaan mereka, membangun pembelajaran dan pengetahuan baru dari hasil-hasil yang diperoleh melalui proses tinjauan (Hockings *et al.*, 2000, 2006; Pomeroy *et al.*, 2004; White *et al.*, 2006). Pembelajaran dapat diterapkan untuk merevisi dan meningkatkan praktik dan upaya pengelolaan yang sedang dilakukan.



## 2. Langkah-Langkah untuk Melaksanakan Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL

Kerangka kerja konseptual efektivitas pengelolaan KKL (Gambar 1) memberikan gambaran visual tentang lima langkah utama untuk melaksanakan proses tinjauan yang efektif, yaitu:

LANGKAH 1: Mengidentifikasi anggota dan membentuk tim peninjau melalui empat langkah berikut:

- Menentukan tingkat kepakaran yang diperlukan untuk melakukan tinjauan
- Menentukan staf atau non-staf mana sajakah yang akan melakukan proses tinjauan
- Menentukan pemangku-kepentingan yang akan dilibatkan dalam proses tinjauan, serta mengidentifikasi bagaimana dan kapan melibatkan mereka
- Membentuk sebuah tim peninjau dan menentukan orang-orang yang bertanggungjawab untuk setiap tugas/kegiatan

*Badan yang bertanggungjawab mengelola KKL seyogianya memimpin proses tinjauan, khususnya pada langkah-langkah persiapan yang meliputi Langkah-Langkah 2, 3 dan 4 di bawah. Tim yang dibentuk seyogianya memiliki anggota-anggota yang mewakili baik badan pengelola dan pemangku-kepentingan kunci terkait, dan tim ini pada akhirnya akan, bersama-sama, bertanggungjawab dalam mengisi kartu skor yang diuraikan pada Langkah 5.*

LANGKAH 2: Konsolidasi, sejauh mungkin, semua informasi latar tentang KKL. Ini dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi latar dan informasi pendukung lainnya tentang KKL yang dikaji (seperti: koordinat KKL, salinan SK, rencana pengelolaan, dan lain-lain).

*Selain penting bagi proses tinjauan itu sendiri, pengumpulan dan penyimpanan informasi yang efisien juga merupakan faktor penting dalam pengelolaan yang efektif. Pengumpulan informasi terutama dilakukan oleh badan pengelola KKL sendiri.*

LANGKAH 3: Mengumpulkan semua data (atau hasil analisis data, laporan, tinjauan, dan lain-lain) yang dikumpulkan melalui semua pemantauan yang telah dilakukan dalam KKL. Sebagai contoh, pemantauan biofisik (misal, pemantauan kesehatan karang), pemantauan sosio-ekonomi (misal, pemantauan persepsi), dan pemantauan tata-kelola (misal, efek dari cara pengamanan dan penegakan tertentu dalam rangka melaksanakan peraturan KKL).

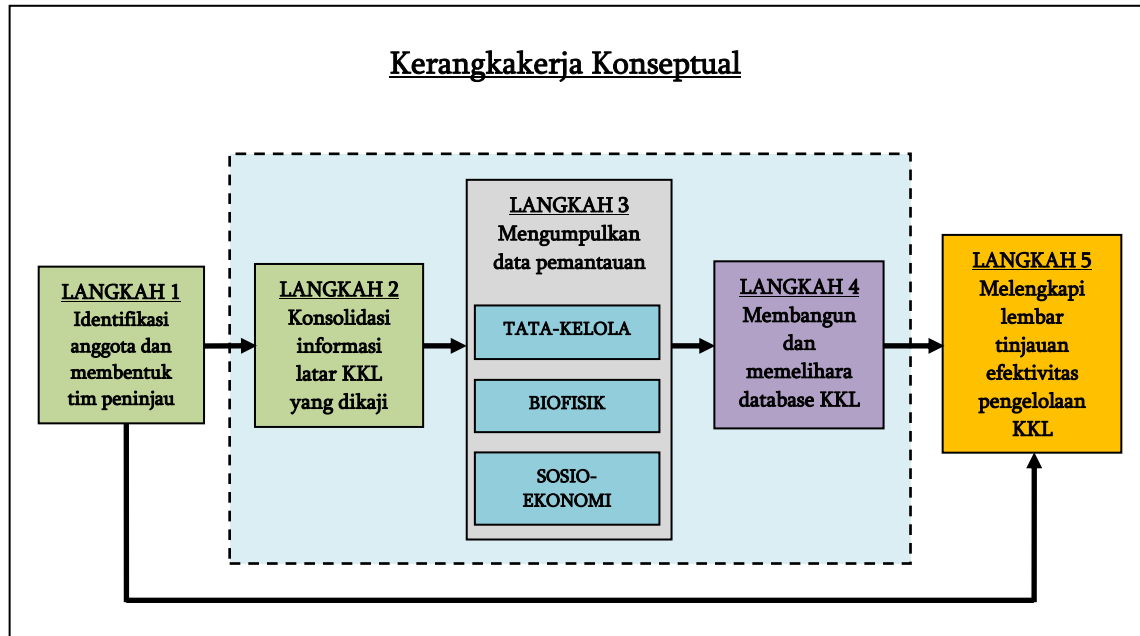
*Pengelolaan yang efektif memiliki dimensi sewaktu/temporal dan penting bagi para peninjau untuk mengetahui apakah kerja-kerja pengelolaan KKL telah secara efektif memelihara, atau meningkatkan, sasaran-sasaran konservasi yang diidentifikasi (misal, suatu habitat terumbu, hutan bakau, atau species tertentu) dan bagaimana sasaran-sasaran tersebut berubah dalam suatu periode waktu tertentu.*

LANGKAH 4: Bila memungkinkan bangun dan pelihara sebuah database untuk menyimpan semua data KKL. Ini merupakan suatu faktor penting dalam pengelolaan KKL yang efektif dalam jangka-panjang dan sangat membantu dalam proses tinjauan.

*Menyimpan informasi dengan tertata rapi dan mudah diakses akan memudahkan proses tinjauan karena jauh lebih efisien dan mudah diulang di lain waktu.*

LANGKAH 5: Melengkapi informasi latar dan kartuskor efektivitas pengelolaan KKL bersama-sama dengan anggota tim tinjauan melalui diskusi kelompok fokus (FGD). Hasil dari proses ini akan menentukan skor pengelolaan KKL.

*Langkah ini merupakan bagian akhir dan penting dari proses tinjauan efektivitas pengelolaan, dan diberikan dalam bentuk kuesioner yang harus diisi oleh para peninjau. Jawaban yang diberikan akan memungkinkan para peninjau untuk menghitung 'skor' atau nilai suatu KKL yang menunjukkan peringkat atau tingkat efektivitas pengelolaan.*



Gambar 1. Kerangkakerja konseptual Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (EPKKL)

Setiap langkah di atas akan diuraikan lebih jauh pada bagian selanjutnya. Meskipun demikian, dikarenakan oleh beragam kendala, tidak semua badan pengelola KKL berada dalam posisi untuk mencapai lima langkah di atas. Kendala tersebut, misalnya, adalah hilangnya informasi latar, ketiadaan sumberdaya untuk melaksanakan proses-proses pemantauan aspek biofisik dan sosial yang direkomendasikan, atau ketiadaan personil teknis untuk merancang dan mengelola database yang efektif. Kendala-kendala ini seyogianya tidak mengendurkan para peninjau untuk melanjutkan proses tinjauan. Kendala ketidakmampuan untuk memenuhi lima langkah di atas pada dasarnya merupakan tantangan bagi pengelolaan yang efektif, dan hal ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi badan pengelola KKL bila dapat menyampaikan dan memahami persoalan ini dalam proses tinjauan mereka. Tahap tinjauan dengan menggunakan kartu skor (LANGKAH 5) akan membantu para peninjau untuk menangkap informasi ini meski tiga langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan secara lengkap.

### **CATATAN PENTING!**

Ada satu hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan LANGKAH 5 (melengkapi kartuskor) yang menghasilkan sebuah 'skor' atau 'peringkat' suatu KKL, kecenderungan para peninjau dari badan pengelola KKL adalah mencapai 'peringkat tinggi'. Pada beberapa kasus, para peninjau bahkan tergoda untuk menjawab pertanyaan agar 'peringkat yang diperoleh tinggi' meski pada kenyataannya jawaban tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan miskonsepsi mendasar bahwa 'peringkat tinggi' adalah keluaran yang diinginkan dari tinjauan ini. Sama sekali bukan; suatu tinjauan efektivitas pengelolaan dirancang untuk memberikan kepada badan pengelola dan para praktisi KKL informasi vital tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan pada pengelolaan. Jadi kartuskor tersebut adalah sebuah perangkat untuk membantu badan pengelola meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Oleh karena itu, **suatu tinjauan yang 'Baik' adalah tinjauan yang secara maksimum mengidentifikasi semua kendala untuk melakukan pengelolaan secara efektif dimana badan pengelola dapat menggunakannya untuk menjawab tantangan atau kendala yang dihadapinya tersebut.** Ini adalah hal penting yang harus menjadi perhatian semua pihak atau peninjau ketika melengkapi kartuskor. Selain itu, agar para pengguna Panduan ini tidak tergoda untuk berupaya mencapai 'peringkat tinggi' secara tidak tepat, kartuskor dirancang sedemikian rupa agar pengguna dan peninjau tidak dapat menaksir peringkat 'tinggi' atau 'rendah' kecuali setelah proses pengisian kartuskor selesai dilakukan.

### 3. Melakukan Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL

Seperti yang diuraikan pada Bab 2, ada lima langkah kunci untuk melaksanakan tinjauan efektivitas pengelolaan. Bab ini menguraikan setiap langkah kunci tersebut.

#### **LANGKAH 1: Mengidentifikasi anggota dan membentuk tim peninjau**

Panduan ini dirancang untuk digunakan oleh badan pengelola sebuah KKL untuk melakukan 'swa-tinjauan' terhadap efektivitas pengelolaan KKL. Dalam hal ini, peninjau adalah badan pengelola itu sendiri. Untuk melakukan proses tinjauan disarankan untuk membentuk sebuah tim yang akan bertanggungjawab untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan analisis awal (Pomeroy *et al.*, 2004) dimana pengelola KKL dapat terlibat atau tidak terlibat dalam tim tersebut. Sangat disarankan bahwa tim yang dibentuk sejauh mungkin dipimpin dan difasilitasi oleh seseorang yang netral atau tak-memihak. Pembentukan tim peninjau dapat dilakukan melalui empat tahapan yang diuraikan di bawah ini (diadaptasi dari Pomeroy *et al.*, 2004).

#### ***A. Menentukan tingkat kepakaran yang diperlukan untuk melakukan tinjauan***

Pengelola dan staf KKL, didampingi oleh seorang ahli biologi dan seorang ilmuwan sosial dapat melakukan tinjauan sederhana. Bagi tinjauan yang lebih rumit diperlukan tambahan anggota tim yang datang dari beragam disiplin ilmu seperti biologi laut, ekologi, oseanografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, hukum dan ilmu politik. Pemilihan tingkat kepakaran yang sesuai untuk melakukan tinjauan akan sangat tergantung kepada ketersediaan kepakaran yang tersedia pada badan pengelola. Sebagai contoh, bila pemantauan biofisik yang rumit dilakukan di suatu KKL maka tim perlu memiliki anggota yang mampu membahas dan menyampaikan temuan-temuan terkait pemantauan dengan baik.

#### ***B. Menentukan orang-orang, baik staf atau bukan-staf, yang akan melakukan proses tinjauan***

Beberapa KKL diperkirakan tidak memiliki staf dengan semua disiplin yang dibutuhkan. Dalam kasus seperti ini, dapat digunakan organisasi atau konsultan eksternal dengan disiplin yang diperlukan. Dalam prosesnya perlu ditentukan pada bagian-bagian mana tinjauan akan dilakukan secara internal dan dengan melibatkan pihak luar. Baik penggunaan peninjau internal maupun eksternal keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tabel 2 di bawah ini merangkum beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan siapa saja yang perlu dilibatkan dalam melakukan tinjauan.

**Tabel 2. Pertimbangan tentang pelibatan peninjau internal *versus* eksternal (Pomeroy *et al.*, 2004)**

<i>Peninjau Internal</i>	<i>Peninjau Eksternal</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat bersifat memihak (<i>bias</i>) dan memiliki hubungan yang rumit dengan masyarakat</li> <li>▪ Memiliki pemahaman tentang sejarah, pengalaman dan rincian tentang tapak</li> <li>▪ Hidup di atau dekat tapak</li> <li>▪ Cenderung untuk fokus kepada isu-isu yang relevan dengan para pengelola (efisiensi dan efektivitas kerja)</li> <li>▪ Tidak selalu memiliki keahlian atau ketrampilan yang diperlukan dan perlu batuan teknis (dari luar)</li> <li>▪ Kemungkinan besar akan terlibat dalam menggunakan atau menerapkan hasil tinjauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bersifat tak-memihak, memiliki perspektif berbeda, dan kredibel</li> <li>▪ Kemungkinan hanya mengetahui pengetahuan lokal secara terbatas, pembelajaran memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit</li> <li>▪ Biasanya hanya tinggal di tapak untuk waktu kunjungan yang singkat</li> <li>▪ Cenderung untuk fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang relevan bagi kelompok eksternal (pemangku-kepentingan, badan-badan pendana)</li> <li>▪ Membawa kepakaran teknis dan perspektif dari tapak-tapak lain</li> <li>▪ Informasi, pengetahuan, perspektif dan ketrampilan yang berharga tidak membekas di tapak</li> </ul>

### ***C. Menentukan bagaimana dan kapan melibatkan para pemangku-kepentingan***

Melibatkan para pemangku-kepentingan dalam proses tinjauan adalah sangat berharga mengingat mereka mungkin tertarik, dan memiliki pandangan sendiri, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dapat berbeda dari apa yang menarik bagi badan pengelola atau para pakar konsultan. Para pemangku-kepentingan juga dapat juga menolong dalam melakukan pengumpulan dan analisis data bagi proses tinjauan. Oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi para pemangku-kepentingan yang akan berpartisipasi dalam tinjauan. Badan pengelola KKL mungkin saja sudah melakukan proses pemetaan pemangku-kepentingan dan sudah memiliki gambaran tentang siapa saja yang harus dilibatkan (sebagai contoh, pengurus masyarakat, tetua setempat, perwakilan dari lembaga akademik/universitas setempat, kelompok-kelompok nelayan, perwakilan industri pariwisata, dan lain-lainnya yang relevan). Bila proses pemetaan belum pernah dilakukan, tersedia sejumlah informasi tentang cara untuk melakukannya<sup>11</sup>. Atau, bagi badan pengelola KKL yang sudah lama didirikan di suatu kawasan biasanya sudah akrab dengan kelompok-kelompok pemangku-kepentingan setempat dan dapat saja melibatkan mereka sesuai dengan kebutuhan.

### ***D. Membentuk tim peninjau dan menentukan orang-orang yang bertanggungjawab untuk setiap kegiatan***

Perlu ditentukan siapa yang akan memimpin tinjauan dan menentukan tanggungjawab setiap anggota tim berdasarkan kepakaran dan pengalaman mereka. Sebagai contoh, ilmuwan kepala atau koordinator pemantauan pada tim peninjau dapat ditugasi untuk mengumpulkan semua data/laporan pemantauan biofisik yang diperlukan; sementara petugas penegak hukum diharapkan untuk membawa atau melaporkan hasil observasi pengamanan dan penegakan pada diskusi kelompok fokus.

<sup>11</sup>Bagi pembaca yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh rincian tentang identifikasi dan pelibatan pemangku-kepentingan, dan proses partisipatif, dapat mengunjungi beragam laman tentang riset aksi partisipatif yang tersedia di internet, antara lain, <http://web.gc.cuny.edu/che/start.htm>, or <http://cadres.pepperdine.edu/ccar/index.html>; dan perangkat pemetaan pemangku-kepentingan dapat ditemukan di, antara lain, <http://www.stakeholdermap.com/> dan <http://www.stakeholdermapping.com/>.

Pengalaman menunjukkan bahwa idealnya jumlah anggota tim tidak lebih dari 10 orang<sup>12</sup>, dengan pengertian bahwa beberapa pertanyaan spesifik mungkin saja perlu diteruskan kepada orang-orang atau para pemangku-kepentingan di luar tim.

## **LANGKAH 2: Mengumpulkan informasi latar tentang KKL yang ditinjau**

Dalam rangka mengkaji efektivitas pengelolaan KKL, informasi dasar tentang KKL yang dikaji harus dikumpulkan dan sedemikian rupa dibuat agar mudah diakses. Rincian tentang informasi latar ini dapat dilihat pada bagian pertama lembar tinjauan dan meliputi, antara lain, informasi tentang habitat-habitat kunci dalam KKL, titik-titik koordinat batas, sumber dukungan financial, kebijakan penegakan, dan lain-lain. Perlu ditekankan bahwa dalam praktiknya seyogianya informasi yang dikumpulkan tidak terbatas pada informasi latar tentang KKL ini saja. Melalui proses pengisian kartuskor (pada LANGKAH 5), tim peninjau akan menemui pertanyaan-pertanyaan tentang status/kecenderungan aspek biofisik KKL, pengaruh atau dampak dari kondisi sosio-ekonomi di sekitar KKL, dan kerangkakerja tata-kelola dimana suatu KKL terletak. Maka akan lebih baik bila semakin banyak informasi yang dapat dikumpulkan oleh tim sebelum peninjauan dilakukan. Pada lembar kartuskor tersedia pilihan jawaban 'Tidak Tahu' (TT). Jawaban ini seyogianya hanya digunakan ketika tim peninjau betul-betul tidak tahu jawabannya, dan akan sangat 'merugikan' ketika digunakan karena informasi yang dicari tidak ada atau hilang (dan ini kadang memang terjadi). Dalam situasi dimana segala upaya telah dilakukan tetapi informasi yang dicari tidak ada atau terlalu sulit untuk diperoleh, baru jawaban TT ini dipilih. Hilangnya informasi ini dapat diketahui melalui pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada kartuskor, dan pada dasarnya sangat berguna bagi para peninjau untuk mengetahui kesenjangan informasi yang dialami oleh sebuah KKL.

## **LANGKAH 3: Mengumpulkan data hasil pemantauan**

Data pemantauan biasanya dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu:

- **Data Biofisik** – ini mencakup semua data yang dikumpulkan dari pemantauan terhadap kondisi biofisik KKL. Data bisa meliputi data biologi dan ekologi seperti kesehatan terumbu, kelimpahan dan keanekaragaman ikan, kelimpahan bakau, pemantauan agregasi pemijahan, pemantauan Setasea, dan lain-lain; dan juga data fisik terkait dengan lingkungan abiotik seperti topografi, rugositas (ketersediaan habitat untuk rekolonisasi organisma), suhu, salinitas, atau aspek-aspek lainnya.
- **Data Sosio-ekonomi** – ini meliputi semua data terkait dengan manusia yang hidup dalam, di sekitar atau dipengaruhi oleh KKL. Data bisa mencakup semua pemangku-kepentingan dan dapat meliputi data dari survei pemanfaatan sumberdaya, data sensus populasi, survei mata-pencarian, pemantauan persepsi, data kesejahteraan, survei kesehatan, survei pendidikan, atau informasi demografi lainnya.

Disamping dua kategori di atas, ada kategori data ketiga yang selama ini kurang dikenal tetapi penting untuk diketahui/direkam:

- **Data Tata-kelola** yang meliputi semua data terkait dengan tata-kelola KKL<sup>13</sup>. Data ini dapat meliputi informasi tentang status hukum dari KKL (Surat Keputusan, penunjukkan,

<sup>12</sup>Jumlah peserta FGD yang optimal adalah 8-10 orang (lihat makalah diskusi oleh Escalada & Heong (2009) di <http://ricehopper.files.wordpress.com/2009/10/focus-group-discussion.pdf>)

<sup>13</sup>Perbedaan mendasar antara 'Tata-kelola' (*Governance*) dan 'Pemerintah' (*Government*) adalah sebagai berikut. 'Pemerintah' adalah sebuah unit politik yang diperintah/diatur khususnya melalui kontrol dan administrasi kebijakan publik; sementara yang dimaksud dengan 'Tata-kelola' di sini adalah segala rupa kerangka pengelolaan yang sedang dilaksanakan di suatu tempat (apakah itu sebuah Taman Nasional, LMMA, KKL, MCA Swasta, dan lain-lain) dan badan pengelola apa pun yang ada di suatu tempat, atau pemangku-kepentingan penting apa pun dalam pengelolaan seperti masyarakat setempat, pemerintah, LSM, sektor swasta, industri, dan lain-lain.

pendirian resmi, dan lain-lain), status perencanaan dan zonasi pengelolaan, kerangkakerja bagi badan pengelola, hak dan tanggungjawab, rencana pendanaan berkelanjutan (cf. Bovarnick, 2010), analisis pemangku-kepentingan, dan lain-lain. Juga, data pemantauan tata-kelola seperti patroli dan pengawasan (termasuk kecenderungan pelanggaran), pemeliharaan papan tanda dan pelampung perbatasan, dan kegiatan-kegiatan lain yang ditujukan untuk meningkatkan dukungan setempat terhadap KKL juga dapat dianggap sebagai data tata-kelola.

Untuk melengkapi kartu skor pada LANGKAH 5 pada Panduan ini, perlu sekali dilakukan pengumpulan, sebanyak mungkin, data pemantauan terkait dengan tiga kategori di atas.

Pada beberapa kasus mungkin tidak semua data tersedia; tetapi hal ini seyogianya tidak menghambat para peninjau. **Tetap mungkin untuk melengkapi kartu skor tanpa informasi lengkap**, dan hasilnya tetap sah selama dapat digunakan untuk memperoleh gambaran dan umpan-balik bagi efektivitas pengelolaan dimana badan pengelola dapat belajar darinya untuk menanggulangi kendala dan kelemahan yang teridentifikasi. Pada kasus lain, para praktisi KKL mungkin data yang tersedia melimpah, tetapi data tersebut belum dianalisis sedemikian rupa untuk memperoleh hasil dan rekomendasi bagi pengelolaan. Sekali lagi, keadaan seperti ini tetap bermanfaat dalam melakukan tinjauan efektivitas pengelolaan, karena ini bisa diidentifikasi oleh peninjau sebagai hal yang perlu ditanggulangi oleh badan pengelola. Menganalisis data secara efektif merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh semua KKL di seluruh dunia, terutama ketika cara-cara pemantauan telah diajarkan dan diterapkan sementara cara-cara untuk analisis tidak diajarkan. Bila relevan, hal ini akan teridentifikasi melalui tinjauan dan kemudian dapat ditanggulangi oleh badan pengelola.

#### **LANGKAH 4: Membangun dan memelihara database KKL**

Informasi latar yang telah dikonsolidasikan (melalui LANGKAH 2), dan data pemantauan yang telah dikumpulkan (melalui LANGKAH 3), idealnya, kemudian disimpan pada sebuah database. Bentuknya bisa berupa kumpulan lembar-kerja Excel atau laporan-laporan terkompilasi. Untuk menjamin bahwa semua berkas yang disimpan dapat dengan mudah dikenali dan diakses oleh pengguna database di masa mendatang, pemberkasan dan pelabelan semua data dan informasi yang dikumpulkan harus dilakukan dengan seksama dan sistematis.

Langkah ini penting karena dua alasan:

- (a) Peninjau membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua informasi pada LANGKAH 2 dan LANGKAH 3, dan mungkin saja dalam prosesnya peninjau menjumpai bahwa beberapa informasi tidak tersedia karena hilang akibat penanganan yang buruk. Agar hal seperti ini tidak terulang lagi ketika anda ingin melakukan tinjauan efektivitas pengelolaan KKL selanjutnya, maka sangat disarankan untuk menyimpan dan memberi label semua data dan laporan dengan cermat untuk memudahkan akses dan pengambilan di masa mendatang.
- (b) Dengan mengumpulkan dan merekam semuanya dengan baik akan lebih mudah untuk menemukan kesenjangan informasi; dan hal ini juga merupakan bagian dari proses tinjauan efektivitas pengelolaan.

Idealnya database dirancang agar mudah dimutakhirkan dan dimodifikasi sesuai dengan data baru yang dikumpulkan. Adalah penting untuk mendirikan cara yang sistematis untuk menambahkan data baru dan untuk mengidentifikasi siapa yang akan bertanggungjawab bagi pemutakhiran dan pemeliharaan database. Perlu ditambahkan disini bahwasanya pembuatan dan pemeliharaan suatu database yang hidup mencakup data, baik dari KKL tunggal dan juga bagi jejaring KKL. Sekali lagi, pada situasi ketika badan pengelola/tim peninjau tidak berada dalam posisi untuk membangun sebuah database, proses tinjauan

tetap bisa dilakukan dan hal ini seyogianya tidak menghalangi tim untuk melakukannya. Pada dasarnya sistem pengarsipan manual yang dikelola dengan baik juga tidak kalah dari sistem database elektronik. Tim peninjau juga dapat menggunakan sistem pengarsipan manual untuk menyimpan semua data dan informasi yang dikumpulkan melalui LANGKAH 2 dan LANGKAH 3, sekaligus untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi, bila ada.

### **LANGKAH 5: Melengkapi Lembar Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL**

Lembar tinjauan efektivitas pengelolaan terlampir, terdiri dari dua bagian: (1) Informasi Latar KKL yang akan merekam data dan informasi penting yang tidak muncul pada daftar Kartu Skor Pengelolaan KKL, dan (2) Kartu Skor Pengelolaan KKL (keduanya diberikan dalam bentuk berkas MS-Word, dan dalam bentuk berkas salinan-lunak MS-Excel yang melampiri Panduan ini). Tim peninjau dapat melengkapi lembar tinjauan yang tersedia, meski lebih disarankan untuk melakukannya pada salinan yang sengaja dibuat apalagi ketika jumlah salinan Panduan sangat terbatas (hanya satu!). Kartu Skor merupakan sebuah sistem penilaian (*scoring*) sederhana mirip dengan yang sudah digunakan pada proses tinjauan efektivitas lainnya (Staub & Hatziolos, 2003; Pomeroy *et al.*, 2004; ; White *et al.*, 2006; Germano *et al.*, 2007; Wells & Mangubhai, 2007) tetapi sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan konteks di Indonesia.

Kartu Skor terlampir terdiri dari lima tabel (A sampai E), dengan 14 pertanyaan pada setiap tabel. Untuk melengkapi kartuskor, pengguna harus memberikan tanda (X) atau (√) pada kolom yang sesuai dengan pertanyaan yang tertera, mulai dari Tabel A, Pertanyaan #1 sampai ke Tabel E, Pertanyaan #14, dengan memberikan jawaban salah satu di bawah ini:

Ya (Y),  
Tidak (T),  
Tidak Tahu (TT), atau  
Tidak Berlaku (TA)

Jumlah semua pilihan yang tersedia (Y, T, TT dan TA) akan menghasilkan angka pada bagian akhir kartuskor yang menunjukkan **'Tingkat Pengelolaan'** suatu KKL yang akan dibahas lebih jauh pada sub-bab 3.1. Angka Tingkat Pengelolaan tersebut dapat dirangkum menjadi sebagai berikut<sup>14</sup>:

- Tingkat Pengelolaan 1 – KKL dimulai
- Tingkat Pengelolaan 2 – KKL dikelola secara minimum
- Tingkat Pengelolaan 3 – KKL dikelola dengan penegakan aturan
- Tingkat Pengelolaan 4 – KKL dikelola secara berkelanjutan
- Tingkat Pengelolaan 5 – KKL dikelola dengan kelembagaan berfungsi penuh

---

<sup>14</sup>Tingkatan ini kurang lebih serupa dengan tahapan pengembangan kawasan lindung (KL) yang umum dijumpai di Indonesia: (1) KL diinisiasi, (2) KL dengan pengelolaan awal (pengelolaan 'lemah' dan tanpa keluaran/*output*), (3) KL dikelola dengan keluaran/*output* (misal, dengan penegakan aturan/peraturan terkait KL), (4) KL dikelola dengan hasil atau *outcomes* (misal: pengurangan signifikan pelanggaran atau kegiatan ilegal dalam kawasan, dan masyarakat setempat mulai memberi dukungan), and (5) pengelolaan KL berfungsi penuh dengan dampak positif (misal, pengelolaan KL secara kolaboratif, dukungan penuh dari masyarakat setempat, dan manfaat diterima oleh para pemangku-kepentingan) (komunikasi pribadi dengan Wahyu Rudianto, Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi, 20 April 2010).



Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan ketika menjawab pertanyaan pada Kartu Skor:

#### **A. Menjawab 'Tidak Berlaku'**

Pilihan jawaban 'Tidak Berlaku' menjadi sangat penting karena tidak semua pertanyaan yang diajukan pada kartu skor berlaku bagi semua KKL. Meski kriteria dan indikator yang dikembangkan dalam Panduan ini dipilih secara hati-hati dikaitkan dengan relevansi dan kesesuaiannya dengan beragam jenis KKL dalam hal pendekatan tata-kelola, skala, ukuran dan tantangan yang dihadapi, harus diakui *tidak semua* pertanyaan berlaku umum bagi semua KKL.

Sebagai contoh, bila pengelola KKL memutuskan untuk tidak menggunakan pelampung tambat sebagai penanda batas, tetapi menggunakan tanda-tanda alam (di darat) untuk menentukan batas-batas KKL dan menjamin ketersediaan kawasan yang sesuai di mana, misalnya, perahu dapat lego jangkar, maka jawaban bagi pertanyaan Tabel B, T#12 – “Apakah pelampung tambat, tanda dan/atau tanda batas sudah dipasang?” adalah 'Tidak Berlaku'.

Jawaban '**Tidak Berlaku**' (TA) seyogianya hanya digunakan ketika pertanyaan tertentu **tidak akan pernah diterapkan (atau berlaku) di suatu KKL selamanya**. Sebagai contoh, misalnya jawaban bagi pertanyaan “Apakah rencana pengelolaan KKL sudah dibuat?” (Tabel B, T#7) adalah 'Tidak', maka jawaban ini menyiratkan bahwa pertanyaan tersebut *berlaku* bagi KKL tersebut; dalam kasus ini, badan pengelola KKL *memang ingin* memiliki sebuah rencana pengelolaan di masa depan, tetapi karena badan pengelola belum memilikinya maka jawabannya adalah 'Tidak'. Selanjutnya sebuah pertanyaan terkait “Apakah Rencana Pengelolaan KKL sudah *diterima* oleh masyarakat setempat?” juga diajukan (Tabel B, T#9); bagaimana tim peninjau akan menjawab pertanyaan ini. Untuk menjawabnya kita harus berhati-hati karena jawaban yang diberikan seyogianya *bukan* 'Tidak Berlaku' (karena KKL tidak punya sebuah dokumen rencana pengelolaan, bagaimana mungkin rencana tersebut diterima oleh masyarakat setempat?). Mengacu kepada jawaban sebelumnya (Tabel B, T#7), maka jawaban untuk pertanyaan ini seyogianya adalah 'Tidak' – karena suatu saat di masa mendatang badan pengelola *memang ingin* menawarkan rencana pengelolaan kepada masyarakat setempat, tetapi (dalam contoh ini) *belum* dilakukan!

Dalam penghitungan skor Tingkat Pengelolaan, jawaban 'Tidak Berlaku' (TA) tidak akan dilibatkan dimana untuk setiap jawaban 'TA' akan (secara otomatis) mengurangi jumlah total pertanyaan yang dijadikan denominator/penyebut dalam persamaan untuk menentukan persen skor. Ini untuk memungkinkan perbandingan antar KKL yang adil sesuai dengan aspek-aspek tata-kelola, biofisik dan sosio-ekonomi pengelolaan dari masing-masing KKL.

#### **B. Menjawab 'Tidak Tahu'**

Jawaban 'Tidak Tahu' (TT) dapat diberikan kapan saja ketika tim peninjau tidak tahu dan tidak dapat menemukan jawaban bagi suatu pertanyaan. Jawaban TT, seperti yang akan dibahas lebih jauh pada sub-bab 4.2, adalah jawaban yang penting sifatnya. Jawaban 'Tidak Tahu' akan diperlakukan sama dengan jawaban 'Tidak' (T) pada saat melakukan penghitungan persentase Tingkat Pengelolaan, dan oleh karenanya jawaban-jawaban 'Tidak Tahu' perlu dicermati dengan serius lebih jauh seperti yang akan kita lihat ketika membahas langkah-langkah selanjutnya pada Bab 4.

### 3.1. Menentukan Tingkat Pengelolaan suatu KKL

Untuk menentukan Tingkat Pengelolaan KKL seperti yang disinggung sebelumnya, dilakukan penghitungan dengan cara berikut:<sup>15</sup>

(a) Pertama-tama kita menentukan skor setiap tabel dalam bentuk persentase atau proporsi dari hasil pengisian kartuskor dan penjumlahan yang sesuai. Misal, sebagai contoh, dari 14 pertanyaan yang tercantum pada Tabel A:

- 11 memperoleh jawaban 'Ya' (Y);
- 1 memperoleh jawaban 'Tidak' (T);
- 1 memperoleh jawaban 'Tidak Tahu' (TT); dan
- 1 memperoleh jawaban 'Tidak Berlaku' (TA) (lihat Tabel 3);

maka hasil yang diperoleh bukanlah persentase atau proporsi 11 jawaban 'Ya' terhadap semua 14 pertanyaan yang tercantum, tetapi persentase atau proporsi 11 jawaban 'Ya' terhadap 13 pertanyaan. Hal ini dikarenakan 1 pertanyaan memperoleh jawaban 'Tidak Berlaku' sehingga dari 14 pertanyaan yang tercantum harus dikurangi 1 agar pertanyaan yang relevan dapat digunakan dalam perhitungan. Hasilnya adalah 11/13 dalam bentuk persentase yaitu 84,6% (lihat Tabel 3 untuk melihat uraian terinci dari proses penghitungan).

**Tabel 3. Contoh penghitungan persentase untuk menentukan Tingkat Pengelolaan KKL**

Semua jawaban 'Ya' (Y)	Semua jawaban 'Tidak' (T)	Semua jawaban 'Tidak Tahu' (TT)	Semua jawaban 'Tidak Berlaku' (TA)	Skor total diharapkan = jumlah total pertanyaan (14) – jumlah jawaban 'Tidak Berlaku'.	13
				14 – 1 = 13	
11	1	1	1	Perhitungan persentase hasil = (Semua jawaban 'Ya' / Skor total yang diharapkan) x 100.  (11 / 13) x 100	<b>84,6%</b>

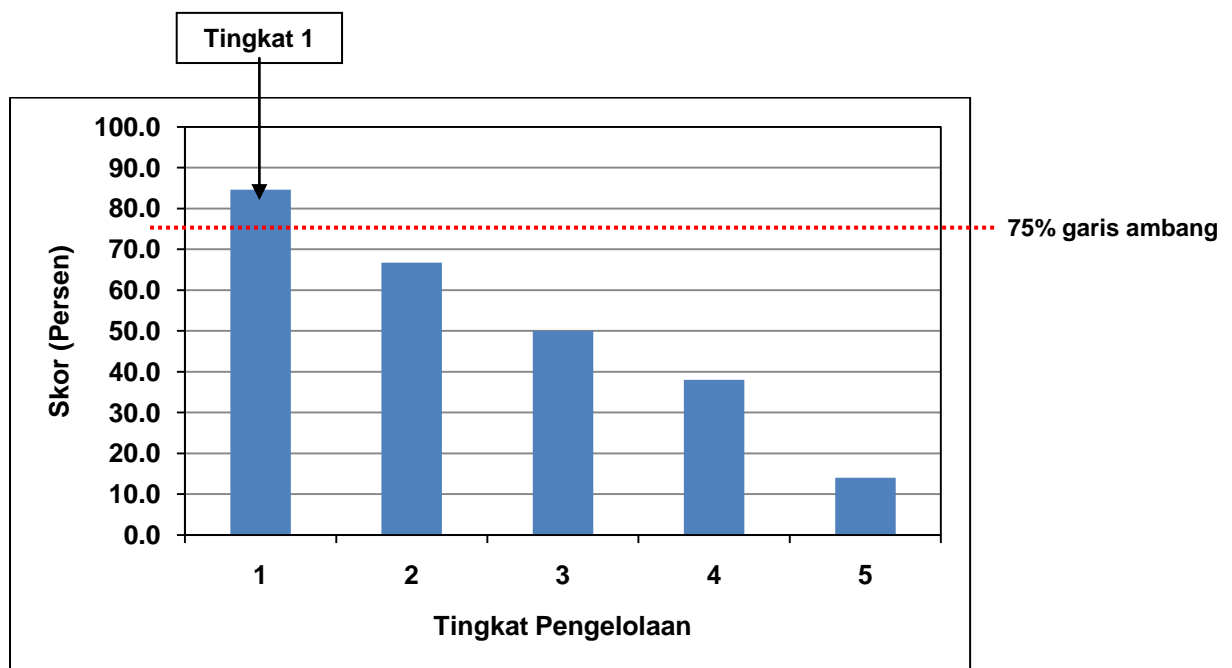
(b) Selanjutnya setiap tabel juga mengalami proses yang sama untuk memperoleh persentase (skor) dari masing-masing tabel tersebut. Perlu ditekankan di sini bahwa semua pertanyaan harus dijawab dengan salah satu jawaban yang tersedia, apakah 'Ya', 'Tidak', 'Tidak Tahu' atau 'Tidak Berlaku'. **Bila ada yang tidak dijawab, ini akan mengganggu penghitungan yang dilakukan!**

<sup>15</sup>Perlu diingat bahwa pada lembar tinjauan dalam bentuk salinan-lunak Excel terlampir, semua perhitungan ini akan berjalan **secara otomatis**. Sekiranya anda ingin melakukan perhitungan secara manual, maka cara penghitungan yang disajikan di sini akan memberikan informasi tentang bagaimana menghitung Tingkat Pengelolaan langsung dari kartuskor.

Tabel 4. Contoh hasil penghitungan semua tabel untuk menentukan Tingkat Pengelolaan

Hasil/Tabel	Semua jawaban 'Ya' (Y)	Semua jawaban 'Tidak' (T)	Semua jawaban 'Tidak Tahu' (TT)	Semua jawaban 'Tidak Berlaku' (TA)	Penghitungan persentase hasil = (Semua jawaban 'Ya'/Skor total yang diharapkan) x100
TABEL A (Tingkat 1)	11	1	1	1	84,6%
TABEL B (Tingkat 2)	8	2	2	2	66,7%
TABEL C (Tingkat 3)	7	5	1	0	50,0%
TABEL D (Tingkat 4)	5	7	1	1	38,0%
TABEL E (Tingkat 5)	2	8	2	0	14,0%

(c) Hasil yang disajikan pada Tabel 4 di atas kemudian ditampilkan ke dalam bentuk grafik histogram berikut:



Gambar 2. Tampilan grafis pemeringkatan Tingkat Pengelolaan

(d) Tingkat Pengelolaan KKL ditentukan berdasarkan persentase skor manapun yang sama atau lebih dari 75 persen. Tingkat ambang 75% ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa bila suatu KKL sudah mencapai (atau lebih dari) tingkatan ini maka KKL tersebut dianggap telah mencapai hasil-hasil positif yang diinginkan atau, ringkasnya, memang layak untuk disebut memiliki efektivitas pengelolaan setingkat tersebut. Pada contoh di atas, jelas bahwa KKL yang ditinjau masih berada pada Tingkat Pengelolaan 1 (Tabel 1) karena hanya ada satu yang memiliki persentase skor di atas 75%. Ini berarti tingkat pengelolaan KKL yang sedang dikaji adalah Tingkat 1.

## Tingkat Pengelolaan:   1

Ini berarti KKL yang anda tinjau adalah (beri tanda pada kotak yang sesuai)

Tingkat	KKL	Hasil
1	Dimulai	√
2	Dikelola secara minimum	
3	Dikelola dengan penegakan aturan	
4	Dikelola secara berkelanjutan	
5	Dikelola dengan kelembagaan berfungsi penuh	

Catatan penting:

- Bila semua persentase skor kurang dari 75% maka Tingkat Pengelolaan KKL tersebut dikategorikan sebagai Tingkat Pengelolaan 1 atau KKL dimulai.
- Penting untuk dicatat bahwa meski skor yang diperoleh adalah 75% tidak berarti bahwa pengelolaan efektif sudah dicapai dengan 'sempurna' tetapi masih ada bagian-bagian yang harus dicapai untuk mencapai standar efektivitas yang ideal (yaitu, 25% bagian yang belum dilaksanakan). Langkah-langkah untuk menangani bagian yang 25% ini dibahas lebih jauh pada Bab 4.

### 3.2. Menentukan peringkat Efek Konservasi

Selain penghitungan Tingkat Pengelolaan di atas, kartuskor terlampir juga memungkinkan tim peninjau untuk menghitung peringkat Efek Konservasi (EK). Peringkat ini bertujuan untuk memberi informasi kepada badan pengelola KKL tentang dampak (positif) konservasi terukur dari KKL yang dikelolanya. EK hanya terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang secara spesifik terhubung dengan hasil-hasil kegiatan terkait konservasi yang terukur pada suatu KKL, dan memberikan skor peringkat yang sangat berguna bagi para pengelola KKL untuk mengkaji kerja-kerja yang dilaksanakan oleh badan pengelola, proses prioritas, dan keberhasilan akhir.

Untuk menghitung peringkat Efek Konservasi, beberapa pertanyaan pada kartu skor telah diberi 'bobot' berdasarkan salah satu kriteria (diadaptasi dari Kapos *et al.*, 2009):

- Kegiatan Implementasi (IK)
- Keluaran (K)
- Hasil (H)
- Efek Konservasi (EK)

Definisi dari kategori-kategori ini ditampilkan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Definisi dan contoh dari empat kriteria konservasi**

Kriteria	Definisi	Contoh
Kegiatan Implementasi (IK)	Kegiatan untuk membantu pelaksanaan aksi-aksi terkait-konservasi	Pertemuan dengan pemangku-kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pengelolaan KKL
Keluaran (K)	Produk keluaran kegiatan-kegiatan implementasi	Dokumen Rencana Pengelolaan
Hasil (H)	Hasil dari implementasi dan keluaran	Bagian dari Rencana Pengelolaan yang mewajibkan pertemuan bulanan dengan para nelayan untuk menyampaikan informasi tentang, antara lain, penangkapan ikan yang merusak, dan pelatihan tentang peralatan yang tak-merusak
Efek Konservasi (EK)	Efek akhir konservasi sebagai hasil dari tiga langkah di atas	Berkurangnya kegiatan perikanan merusak dalam KKL, dan membaiknya status lingkungan biofisik dan/atau meningkatnya kondisi sosio-ekonomi.

Pada bagian sebelah kiri setiap tabel Kartuskor, terdapat kolom yang menunjukkan Kriteria Konservasi (KK).

T#	Kat	KK
1.	B	IK
2.	SE	IK
3.	SE	K
4.	TK	H
5.	B	EK

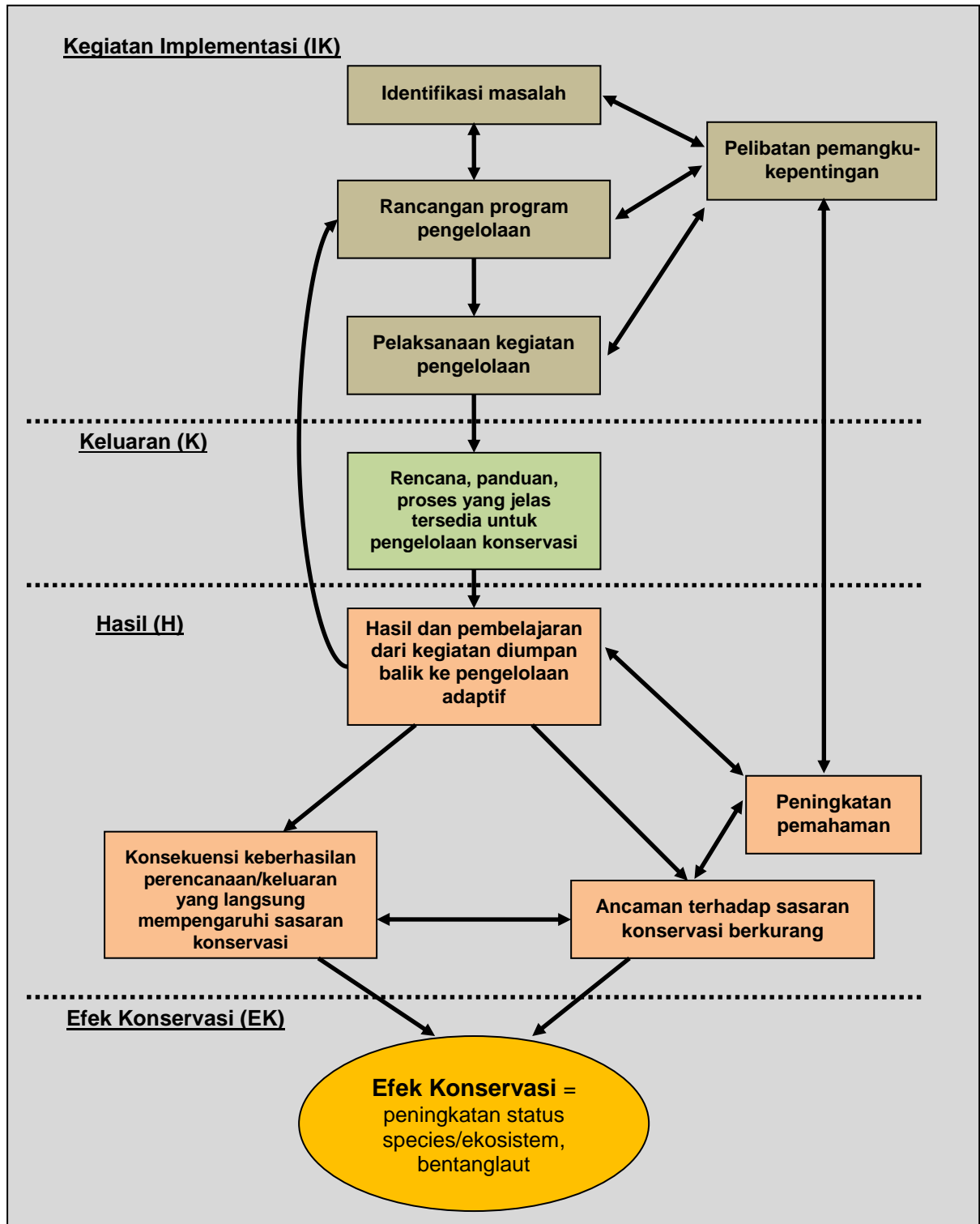
**Kriteria Konservasi**

Kolom ini menunjukkan apakah pertanyaan yang diajukan terkait dengan Kegiatan Implementasi (IK), Keluaran (K), Hasil (H) atau Efek Konservasi (EK). Hanya jawaban spesifik terkait pertanyaan EK yang akan menentukan peringkat Efek Konservasi suatu KKL. Seperti pada penghitungan Tingkat Pengelolaan, jawaban 'Tidak Berlaku' (TA) juga digunakan pada penghitungan peringkat EK ini.

Peringkat Efek Konservasi ini diperlukan karena dua alasan:

- (a) Secara tradisional, laporan-laporan yang dibuat (laporan untuk lembaga donor, laporan tahunan, dan lain-lain) biasanya berisi laporan tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan keluaran-keluaran yang diinginkan. Keterkaitan antara kegiatan-kegiatan ini dengan 'efek konservasi' yang diinginkan dalam banyak kasus lebih banyak dilaporkan sebagai asumsi (Kapos *et al.*, 2008). Hal ini terjadi umumnya dikarenakan lebih mudah untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan, keluaran dan hasil kegiatan daripada efek konservasi. Selain itu, efek dari kegiatan implementasi, keluaran dan hasil terhadap dampak langsung konservasi tidak selalu terjadi secara linier dan adalah perlu bagi para peninjau untuk mengkaji dengan seksama dan hati-hati apakah implementasi kegiatan yang efektif akan mengarah kepada 'konservasi (yang) efektif'.
- (b) Meski sebagian besar pertanyaan yang dicantumkan pada kartu skor pengelolaan adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan implementasi, keluaran dan hasil, pada beberapa bagian disisipkan indikator-indikator kunci efek konservasi dan mereka dapat dikenali dan diperingkat untuk melakukan kajian sekunder bagi tinjauan efektivitas pengelolaan. Dengan cara ini, peringkat juga dapat digunakan oleh para pengelola KKL sebagai acuan untuk mengetahui perbedaan di antara kegiatan-kegiatan (IK, K dan H) yang tidak akan mencapai atau memberikan efek konservasi bila tidak ada tindak lanjut terhadap mereka. Sebagai contoh, pembuatan atau pembelian sebuah perahu patroli (IK), perahu patroli itu sendiri (K) dan patroli keliling kawasan dengan menggunakan perahu tersebut (H), semuanya adalah langkah-langkah antara bagi pencapaian efek konservasi (EK) yang dalam hal ini ditunjukkan oleh, antara lain, berkurangnya kehadiran nelayan ilegal yang menggunakan cara tangkap merusak di dalam KKL.

Keterkaitan di antara semua tahapan pengelolaan konservasi disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Model konseptual keterkaitan antara 'implementasi kegiatan' dan 'efek konservasi' (diadaptasi dari Kapos *et al.*, 2009, hal. 338)

Untuk menghitung persentase bagi penentuan peringkat Efek Konservasi (EK), digunakan rumus sederhana berikut:

$$(N / D) \times 100\%$$

Dengan,

N = jumlah pertanyaan EK dengan jawaban 'Ya'<sup>16</sup>.

D = jumlah total pertanyaan EK yang relevan/berlaku di suatu KKL<sup>17</sup>.

Perlu diingatkan bahwa pada salinan-lunak Excel lembar tinjauan yang menyertai Panduan ini, penghitungan EK terjadi secara otomatis.

Ada 11 pertanyaan EK yang terdapat pada kartuskor, tetapi tidak semua pertanyaan ini relevan atau berlaku pada setiap KKL. Sebagai contoh, bila pertanyaan EK yang relevan dengan KKL yang sedang dikaji, maka harga D = 8. Bila semua pertanyaan relevan dengan KKL yang sedang dikaji maka harga D = 11. Dengan menjawab semua pertanyaan yang tersedia dan memilih kolom 'TA' ketika pertanyaan tersebut tidak berlaku bagi KKL yang sedang dikaji, maka akan mudah untuk menentukan harga 'D' (yaitu semua pertanyaan EK yang tersedia [11] dikurangi dengan yang memperoleh jawaban 'TA').

Begitu kita mengetahui harga D, yaitu jumlah total pertanyaan EK yang relevan/berlaku pada KKL yang sedang dikaji, maka akan mudah untuk melakukan penghitungan peringkat EK.

Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa jumlah pertanyaan EK yang relevan/berlaku pada KKL yang sedang dikaji adalah 11 (D=11), dan misalnya 4 pertanyaan memperoleh jawaban 'Ya' (N=4), maka peringkat EK adalah:

$$(N / D) \times 100\% \\ (4/11) \times 100\% = 36,4\%$$

Contoh lainnya, jumlah pertanyaan EK yang berlaku adalah 9 (D=9), dan jumlah pertanyaan yang memperoleh jawaban 'Ya' adalah 7 (N=7), maka peringkat EK adalah:

$$(N / D) \times 100\% \\ (7/9) \times 100\% = 78\%$$

Persentase yang dihasilkan ini berkorelasi langsung dengan salah satu dari empat peringkat Efek Konservasi berikut:

- Peringkat 1 – Efek Konservasi belum terukur atau teramati, atau teramati pada kurang dari seperempat (<25%) bidang-bidang efek yang diketahui.
- Peringkat 2 – Efek Konservasi terukur atau teramati pada lebih dari seperempat (>25%) tetapi kurang dari sebagian (<50%) bidang-bidang efek yang diketahui.
- Peringkat 3 – Efek Konservasi terukur atau teramati pada lebih dari setengah (>50%) tetapi kurang dari tiga perempat (<75%) bidang-bidang efek yang diketahui.
- Peringkat 4 – Efek Konservasi terukur atau teramati pada lebih dari tiga perempat (>75%) bidang-bidang efek yang diketahui.

Yang dimaksud dengan “bidang-bidang efek yang diketahui” adalah bidang-bidang yang diketahui penting bagi suatu KKL dan diidentifikasi melalui proses pengkajian.

Maka dari dua contoh di atas peringkat EK dari contoh KKL pertama (36,4%) adalah 2 – *“Efek Konservasi terukur atau teramati pada lebih dari seperempat (>25%) tetapi kurang dari sebagian (<50%) bidang-bidang efek yang diketahui.”* Sementara dari KKL contoh kedua (78%) peringkat EK adalah 4 – *“Efek Konservasi terukur atau teramati pada lebih dari tiga perempat (>75%) bidang-bidang efek yang diketahui.”*

---

<sup>16</sup>Nominator/pembilang

<sup>17</sup>Denominator/penyebut



### 3.3. Perbedaan antara Tingkat Pengelolaan & peringkat Efek Konservasi

Sekali lagi perlu ditekankan bahwa terdapat perbedaan penting antara kajian Tingkat Pengelolaan (yang diuraikan pada sub-bab 3.1) dan peringkat Efek Konservasi (yang diuraikan pada sub-bab 3.2).

**Kajian Tingkat Pengelolaan** memberikan kepada badan pengelola KKL pemahaman tentang dimana mereka 'berada' dikaitkan dengan inisiasi, pendirian, penegakan dan pelembagaan sistem pengelolaan pada sebuah KKL. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa, pada dasarnya semua kegiatan terkait pengelolaan yang sedang atau sudah dilakukan tidak dengan serta merta memberikan konservasi yang berhasil; melaksanakan kegiatan pengelolaan tidak dapat dianggap secara otomatis memiliki dampak konservasi. Sebagai contoh, salah satu prioritas utama dari sebagian besar KKL di seluruh dunia adalah memiliki rencana zonasi, dan hal ini merupakan suatu hal mendasar bagi KKL-KKL tersebut. Waktu, upaya dan sumberdaya telah dituangkan untuk merancang dan membuat rencana zonasi, dengan melibatkan juga konsultasi dengan para pemangku-kepentingan yang sesuai, penggunaan senarai perangkat perencanaan konservasi, SIG dan perangkat-lunak lainnya, sering dengan biaya yang sangat mahal. Harus diakui bahwa ini adalah kerja-kerja penting terkait dengan perancangan dan pendirian KKL, tetapi tetap harus selalu diingat bahwa meski sebuah rencana zonasi, dan bahkan rencana pengelolaan, sudah tersedia, ini tidak berarti bahwa efek konservasi dari pengelolaan KKL juga sudah berjalan/terjadi.

Tentunya kita tidak ingin mengalami 'sindrom lemari buku' yaitu suatu situasi dimana dokumen yang dibuat dengan banyak biaya dan sumberdaya akhirnya hanya tersimpan di lemari buku, tanpa pernah rencana atau pun strategi yang ada di dalamnya dilaksanakan. Bila kita hanya mengandalkan pada mengisi kotak yang menyatakan pelaksanaan rencana dan proses (seperti, sebagai contoh, 'rencana zonasi sudah dibuat') dalam melakukan tinjauan efektivitas pengelolaan KKL, maka kita akan gagal mengkaji hasil dan efek konservasi kongkrit yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Ini lah alasan utama mengapa perlu ditambahkan peringkat Efek Konservasi dalam meninjau efektivitas pengelolaan KKL.

**Peringkat Efek Konservasi** bertujuan untuk memberi badan pengelola KKL informasi tentang 'dimana KKL tersebut berada' dalam hal dampak konservasi yang terukur pada KKL tersebut. Peringkat ini hanya terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang secara spesifik terkait pada hasil-hasil konservasi yang dilakukan oleh KKL dan memberikan petunjuk yang sangat berguna bagi para pengelola KKL dalam rangka mengkaji kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan pengelola, proses prioritasasi, dan keberhasilan konservasi.

Dengan menggunakan dua kajian ini, dapat saja sebuah KKL memiliki Tingkat Pengelolaan tinggi tetapi peringkat Efek Konservasi rendah, atau sebaliknya. Hasil yang diperoleh dapat digunakan oleh badan pengelola untuk menyesuaikan dan menajamkan proses perencanaan, serta betul-betul menyasarkan kerja-kerja mereka secara efektif untuk mencapai hasil konservasi kongkrit yang diinginkan.

### 3.4. Fitur-fitur lain pada Kartuskor

Anda akan melihat bahwa terdapa dua komponen lain yang ditampilkan pada kartuskor yang disajikan pada bagian 2 lembar tinjauan efektivitas pengelolaan:

## A. Label Pertanyaan

T#	Kat	KK
1.	B	IK
2.	SE	IK
3.	SE	K
4.	TK	H
5.	B	EK

Di bagian sebelah kiri kartuskor terdapat tiga kolom dengan label T#, Kat dan KK.

Masing-masing berarti:

- T# – nomor Pertanyaan
- Kat – Kategori
- KK – Kriteria Konservasi

Apa yang dimaksud dengan *nomor Pertanyaan* cukup jelas.

*Kategori:* Anda mungkin ingat pada LANGKAH 3 proses tinjauan tentang mengumpulkan informasi dari tiga kategori berbeda, yaitu informasi-informasi biofisik, sosio-ekonomi, dan tata-kelola. Kolom ini memberikan kode untuk memudahkan para anggota tim peninjau mengetahui apakah jenis pertanyaan yang diajukan masuk ke dalam kategori biofisik (B), sosio-ekonomi (SE), atau tata-kelola (TK). Ini akan membantu tim peninjau untuk memperkirakan pada bagian mana jawaban bagi pertanyaan tersebut dapat ditemukan.

*Kriteria Konservasi:* Ini memberikan petunjuk kepada tim peninjau mengacu kepada kriteria konservasi apakah pertanyaan yang diajukan, apakah merupakan pertanyaan tentang Kegiatan Implementasi (IK), Keluaran (K), Hasil (H), atau Efek Konservasi (EK). Tiga kriteria pertama (IK, K dan H) ditampilkan sebagai perangkat pembelajaran bagi para praktisi KKL, sementara kriteria Efek Konservasi (EK) digunakan untuk mengkaji peringkat Efek Konservasi.

## B. Indikator dan Pengumpulan Data

Di bagian sebelah kanan Kartu Skor terdapat kolom berjudul “Indikator dan Pengumpulan Data” (lihat Gambar 4). Kolom ini mempunyai tiga maksud/kegunaan:

- Untuk membantu tim peninjau mendokumentasikan dan merekam dari mana semua informasi diperoleh, dimana disimpan, dan kemudahan mengakses kembali di masa mendatang.
- Berguna sebagai perangkat pembelajaran bagi para praktisi KKL dalam membuat indikator kegiatan dan membangun mekanisme pembuktian bahwa suatu kegiatan atau pekerjaan sudah atau sedang dilakukan di suatu KKL.
- Untuk memberikan referensi atau kepustakaan sah untuk mendukung jawaban yang diberikan pada kolom jawaban kartu skor (untuk digunakan oleh badan pengelola bila diinginkan/diperlukan).

Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data																		
Y	T	TT	TA																			
				Laporan survei garisdasar tersedia. Judul: [ _____ ] Tempat: [ _____ ] Nama metoda yang digunakan pada survei biofisik: [ _____ ]																		
				Sebutkan kegiatan-kegiatan kunci yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kepedulian tentang fungsi & manfaat KKL? 1. [ _____ ] 2. [ _____ ] 3. [ _____ ]																		
				Notulen rapat tersedia. Tempat: [ _____ ]																		
				Sebutkan pelatihan yang sudah diberikan (tambahkan baris bila diperlukan): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nama staf / perwakilan pengelola</th> <th style="width: 33%;">Posisi pada badan pengelola</th> <th style="width: 33%;">Pelatihan yang diikuti (sebutkan berapa lama)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Nama staf / perwakilan pengelola	Posisi pada badan pengelola	Pelatihan yang diikuti (sebutkan berapa lama)															
Nama staf / perwakilan pengelola	Posisi pada badan pengelola	Pelatihan yang diikuti (sebutkan berapa lama)																				
				Sebutkan tujuan-akhir dan sasaran-sasaran KKL. [ _____ ]																		

Gambar 4. Contoh kolom 'Indikator dan Pengumpulan Data'

Bagian kartu skor ini bersifat tambahan, dan kita tetap dapat menghitung Tingkat Pengelolaan dan peringkat Efek Konservasi tanpa melengkapi kolom ini<sup>18</sup>. Walaupun demikian, *sangat direkomendasikan* kepada tim peninjau untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kolom bagian ini untuk menemukan, menyimpan dan mendokumentasikan informasi penting yang diperlukan untuk menunjang proses-proses tinjauan di masa selanjutnya, selain mendorong 'pembelajaran sambil melakukan' melalui proses peninjauan.

### 3.5. Rentang waktu untuk melakukan tinjauan

Tentang berapa lama suatu tinjauan dilakukan, tidak ada rentang waktu pasti karena tergantung kepada kerja-kerja pengumpulan data & informasi yang diperlukan, ketersediaan staf, perlu tidaknya melibatkan pakar-pakar yang sesuai, dan beberapa faktor terkait lainnya.

Secara umum, direkomendasikan agar tahapan persiapan tinjauan (LANGKAH-LANGKAH 2, 3 dan 4) dapat diselesaikan dalam waktu satu sampai dua bulan (tanpa meninggalkan tugas rutin) sementara LANGKAH 5, yaitu melengkapi kartu skor melalui diskusi kelompok fokus

<sup>18</sup>Dengan pengecualian bagi pertanyaan T#4 pada Tabel B dimana tim peninjau diharuskan memberikan informasi tentang empat, atau paling tidak dua, aspek biofisik prioritas (yang sedang dipantau) yang dipandang paling penting bagi integritas KKL (seperti kesehatan terumbu, agregasi memijah ikan, kegiatan menyangar penyuy, dan lainnya), karena pada bagian selanjutnya akan ditanyakan kembali tentang aspek-aspek prioritas biofisik ini.

dapat dilakukan dalam kurun 3 hari sampai 1 minggu (tergantung kepada kondisi KKL yang dikaji). Penting disampaikan disini bahwa pelaksanaan LANGKAH-LANGKAH 2, 3 dan 4 hanya terasa berat atau membebani pada saat tinjauan pertama kali dilakukan. Begitu semua informasi latar dan data pemantauan sudah terkumpul (dan idealnya didirikan suatu sistem untuk mengumpulkan dan menyimpan semua data yang terkumpul kemudian di masa mendatang), maka pelaksanaan tinjauan selanjutnya prosesnya akan berjalan lebih cepat, kemungkinan 3 sampai 7 hari dan hanya memerlukan masukan bagi LANGKAH 5 saja.

## 4. Langkah Selanjutnya: Setelah Tinjauan

Setelah melengkapi semua langkah-langkah yang diuraikan di atas, dan dilengkapi dengan hasil tentang Tingkat Pengelolaan dan peringkat Efek Konservasi, maka langkah penting selanjutnya adalah menggunakan hasil dari Kartu Skor Pengelolaan KKL untuk merencanakan kegiatan-kegiatan di masa mendatang.

### 4.1. Menangani jawaban 'Tidak'

Langkah vital selanjutnya untuk menerapkan hasil kajian dari Kartu Skor Pengelolaan KKL adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang memperoleh jawaban 'Tidak' (T) atau 'Tidak Tahu' (TT). Perlu diingat bahwa jawaban 'Tidak' menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut sebetulnya *dapat dilaksanakan* tetapi belum dilakukan, dan berbeda dari jawaban 'Tidak Berlaku' (TA). Sementara, jawaban 'Tidak Tahu' menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut juga dapat dilaksanakan tetapi anggota tim peninjau tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah selesai dilaksanakan atau belum, dan lainnya.

Misalkan, 6 dari 14 pertanyaan pada Tabel A memperoleh jawaban 'Tidak'. Maka ini berarti 6 dari semua kegiatan *yang seharusnya dilaksanakan* pada tahap awal pendirian KKL (yang relevan dengan KKL yang anda kaji) belum dilakukan sama sekali. Dengan membuat daftar pertanyaan dengan jawaban 'Tidak' ini, badan pengelola dapat memeriksa kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut, dan membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan pada daur pelaksanaan proyek atau tahun takwim selanjutnya untuk menjawab persoalan tersebut. Sebagai contoh, bila jawaban bagi pertanyaan T#7 pada Tabel A "Apakah program pendidikan untuk meningkatkan kepedulian tentang fungsi dan manfaat KKL sudah dimulai?" adalah 'Tidak' (ini berarti kegiatan tersebut *seharusnya dilaksanakan* tetapi belum dilakukan), maka badan pengelola dapat menggunakan temuan ini untuk merencanakan kegiatan yang relevan untuk memulai program pendidikan pada tahun takwim berikutnya. Contoh lain adalah bila jawaban bagi pertanyaan T#12 pada Tabel B "Apakah pelampung tambat, pelampung penanda dan/atau penanda batas sudah dipasang?" adalah 'Tidak', maka otoritas pengelola KKL dapat membuat rencana untuk memasang sejumlah pelampung tambat, pelampung penanda dan/atau penanda batas sesuai dengan anggaran yang tersedia pada tahun takwim selanjutnya, atau paling tidak mencatat faktor-faktor apa yang menghambat atau menjadi kendala bagi kegiatan tersebut, seperti misalnya keterbatasan anggaran, ketiadaan sumberdaya manusia, dan lainnya. Dokumentasi tentang keterbatasan ini juga dapat digunakan oleh badan pengelola ketika mengajukan anggaran atau dukungan atau kapasitas teknis lebih besar bagi pencapaian tujuan-akhir pengelolaanya.

### 4.2. Menangani jawaban 'Tidak Tahu'

Tidak kalah pentingnya dengan menangani pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban 'Tidak' adalah menangani pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban 'Tidak Tahu'. Sebagai contoh, bila jawaban bagi pertanyaan T#7 pada Tabel C "Apakah kegiatan penegakan dilakukan secara teratur?" adalah 'Tidak Tahu' maka hal ini menunjukkan bahwa ada suatu kesenjangan pengetahuan/informasi terkait dengan badan pengelola. Sebagai tindak-lanjut, badan pengelola seyogianya berupaya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang memperoleh jawaban 'Tidak Tahu' tersebut.

### **4.3. Seberapa sering tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL perlu dilakukan?**

Bila dilengkapi dan diperbaharui secara teratur, kajian dengan menggunakan Panduan ini memberikan informasi tentang perubahan status dan kualitas pengelolaan KKL dan efek konservasi yang terkait dengannya. Selain itu, kajian juga memberikan umpan-balik tentang bagaimana KKL yang dikaji bila dibandingkan dengan KKL-KKL lain yang ada di Indonesia.

Meski tidak ada aturan tentang seberapa sering suatu kajian dengan menggunakan lembar tinjauan yang tersedia (seseorang dapat saja melakukannya sesering mungkin bila dirasa penting), sangat direkomendasikan untuk melakukan kajian setiap:

- Dua tahun bagi KKL yang masuk ke dalam kategori Tingkat 1 (KKL dimulai) dan Tingkat 2 (KKL dikelola secara minimum); dan
- Tiga tahun untuk KKL yang memiliki kategori Tingkat 3 (KKL dikelola dengan penegakan aturan), Tingkat 4 (KKL dikelola secara berkelanjutan), dan Tingkat 5 (KKL dikelola dengan kelembagaan berfungsi penuh).

Alasan mengapa bagi KKL yang memiliki kategori Tingkat 1 dan 2 kajian perlu lebih sering dilakukan adalah karena KKL dengan kategori ini masih berada pada tahap awal pendiriannya. Jadi, pengkajian yang lebih sering akan memberikan lebih banyak masukan dan umpan-balik untuk meningkatkan dan memperkuat kegiatan-kegiatan pengelolaan.

## 5. Rangkuman

Panduan ini dibuat dengan dua tujuan utama: (1) untuk membantu para pengelola KKL dalam melakukan swa-kajian untuk mengetahui seberapa efektif mereka mengelola KKL; dan (2) untuk membantu para pengelola KKL mengidentifikasi kesenjangan yang perlu dihilangkan dalam rangka mencapai tingkat efektivitas pengelolaan yang lebih tinggi.

Dengan mengikuti lima langkah utama yang diuraikan pada Panduan ini: (1) mengidentifikasi anggota dan membentuk tim peninjau; (2) konsolidasi informasi latar tentang KKL; (3) mengumpulkan data pemantauan aspek-aspek biofisik, tata-kelola dan sosio-ekonomi; (4) membangun dan memelihara database KKL; dan (5) melengkapi lembar tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL; diharapkan bahwa para pengguna/ peninjau akan dapat menentukan Tingkat Pengelolaan dan peringkat Efek Konservasi KKL mereka berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan, serta menentukan apakah tujuan-akhir dan tujuan-tujuan antara yang dinyatakan sedang dicapai (setelah satu periode waktu tertentu), dan mampu untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang belum atau perlu dilaksanakan dalam rangka membuat rencana bagi pengembangan KKL di masa mendatang.

Skor dan tingkat yang dicapai melalui setiap tinjauan tidak ditujukan untuk menentukan status 'pasti' dari efektivitas pengelolaan, tetapi untuk lebih mencerminkan tingkat pencapaian relatif terhadap tujuan-akhir dan tujuan-tujuan antara yang dinyatakan dari sebuah KKL yang dapat digunakan kemudian untuk mengarahkan pengembangan dan pengelolaan KKL menuju masa depan.

Panduan ini secara keseluruhan menyajikan sebuah proses untuk memfasilitasi pembelajaran untuk meningkatkan dan memperkuat pengelolaan KKL agar pencapaian tujuan-akhir konservasi semakin efektif. Perlu ditekankan bahwa melakukan tinjauan 'efektivitas pengelolaan' bukanlah untuk menentukan bahwa suatu KKL itu 'baik' atau 'buruk', tetapi tinjauan merupakan pembelajaran dan upaya untuk meningkatkan proses-proses pengelolaan. Sebuah KKL yang dikelola dengan efektif akan meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati laut yang pada gilirannya memperkuat layanan ekosistem yang manfaatnya berguna untuk mendukung pembangunan berkelanjutan masyarakat setempat, bangsa dan dengan sendirinya sumberdaya dan ekosistem laut dimana kita semua bergantung.

## Kepustakaan

- Agardy, T. & Staub, F. (2006) *Marine Protected Areas and MPA Networks*. New York: American Museum of Natural History, Center for Biodiversity and Conservation, The Network of Conservation Educators & Practitioners.
- Agardy, T. & Wolfe, L. (2002) *Institutional Options for Integrated Management of North American Marine Protected Areas Network: a CEC Report*. Montreal: Commission for Environmental Cooperation.
- Bovarnick, A. (2010) *Financial Sustainability Scorecard for National Systems of Protected Areas*, second edition. New York: UNDP, 24 p. Available from <http://www.undp.org/gef/kmanagement/newpublication.html>
- Germano, B.P., Cesar, S.A. & Ricci, G. (2007) *Enhancing Management Effectiveness of Marine Protected Areas: A Guidebook for Monitoring and Evaluation*. Visca, Baybay, Leyte, Philippines: Leyte State University, Institute of Tropical Ecology, Marine Laboratory.
- Hockings, M., Stolton, S. & Dudley, N. (2000) *Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing the Management of Protected Areas*. Gland, Switzerland & Cambridge, UK: IUCN (The World Conservation Union), x +121 p.
- Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. & Courrau, J. (2006) *Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas*, second edition. Gland, Switzerland & Cambridge, UK: IUCN (The World Conservation Union), xiv +105 p.
- IUCN (1999) *Guidelines for Marine Protected Areas*. Gland, Switzerland & Cambridge, UK: IUCN (The World Conservation Union), xxiv + 107 p.
- IUCN (2005) *Benefits Beyond Boundaries: Proceedings of the 5<sup>th</sup> IUCN World Parks Congress*. Gland, Switzerland & Cambridge, UK: IUCN (The World Conservation Union), ix + 306 p.
- IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA) (2008) *Establishing Resilient Marine Protected Area Networks – Making It Happen*. Washington, DC: IUCN-WCPA, National Oceanic and Atmospheric Administration, and & The Nature Conservancy, 118 p.
- Kapos, V., Balmford, A., Aveling, R., Bubb, P., Carey, P., Entwistle, A., Hopkins, J., Mulliken, T., Safford, R., Statterfield, A., Walpole, M. & Manica, A. (2008) Calibrating conservation: new tools for measuring success. *Conservation Letters*, 1: 155–164.
- Kapos, V., Balmford, A., Aveling, R., Bubb, P., Carey, P., Entwistle, A., Hopkins, J., Mulliken, T., Safford, R., Stattersfield, A., Walpole, M. & Manica, A. (2009) Outcomes, not implementation, predict conservation success. *Oryx*, 43(3): 336–342.
- Kelleher, G., Bleakley, C. & Wells, S. (1995). *Global Representative System of Marine Protected Areas*. Washington, DC: The World Bank, 4 volumes.
- Mora, C., Andrefouet, S., Costello, M.J., Kranenburg, C., Rollo, A., Veron, J., Gaston, K.J. & Myers, R.A. (2006) Coral reefs and the global network of Marine Protected Areas. *Science*, 312(5781): 1750-1751.
- NRC (National Research Council); Commission on Geosciences, Environment, and Resources; Ocean Studies Board; Committee on the Evaluation, Design, and Monitoring of Marine Reserves and Protected Areas in the United States (2001) *Marine Protected Areas: Tools for Sustaining Ocean Ecosystems*. Washington, DC: National Academy Press, xv + 288 p.



- Parks, J.E., Pomeroy, R.S. & Philibotte, J. (2006) Experiences and Lessons Learned from Evaluating the Management Effectiveness of Marine Protected Areas in Southeast Asia and the Pacific Islands. *Invited Paper Presentation from the CBD/IUCN International Workshop for Better Management of Protected Areas, Jeju Island, Korea, October 24-27, 2006.*
- Pomeroy, R.S., Parks, J.E. & Watson, L.M. (2004) *How is Your MPA Doing? A Guidebook of Natural and Social Indicators for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness.* Gland, Switzerland & Cambridge, UK: IUCN (The World Conservation Union), xvi + 216 p.
- Staub, F. & Hatzios, M.E. (2004) *Score Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Areas.* Washington, DC: The World Bank, 30 p.
- UNEP-WCMC (2008) *National and Regional Networks of Marine Protected Areas: A Review of Progress.* Cambridge: UNEP-WCMC.
- Wells, S. & Mangubhai, S. (2007) *A Workbook for Assessing Management Effectiveness of Marine Protected Areas in the Western Indian Ocean.* Nairobi, Kenya: IUCN Eastern Africa Regional Program, viii + 60 p.
- White, A., Porfirio, A. & Meneses, A. (2006). *Creating and Managing Marine Protected Areas in the Philippines.* Cebu City, Philippines: Fisheries Improved Sustainable Harvest Project, Coastal Conservation and Education Foundation, Inc., and University of the Philippines Marine Science Institute, viii + 83 p.
- Wood, L. (2007). MPA Global: A database of the world's marine protected areas. Sea Around Us Project. UNEP-WCMC & WWF. [www.mpaglobal.org](http://www.mpaglobal.org)

# Lembar Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL

[Salinan-lunak buku-kerja MS-Excel untuk “Lembar Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL” ini dibuat dan dikembangkan oleh I Nyoman Suardana/TNC-IMP]

Tanggal pengisian:

Untuk memudahkan pengambilan data di lain waktu, disarankan untuk menyimpan berkas dengan nama yang menunjukkan tanggal pengisian kartu skor dengan susunan sebagai berikut: **MPAME** [garisbawah] <nama KKL> [garisbawah] <tanggal pengisian>. Contoh: MPAME\_Wakatobi\_23Mei09.xls

## Bagian 1: Informasi Latar KKL

### A. Uraian dan Status KKL

Nama KKL:	<input type="text"/>
Luas KKL (ha):	<input type="text"/>
Propinsi:	<input type="text"/>
Kabupaten:	<input type="text"/>

### Koordinat batas (derajat-menit-detik):

Titik	Lintang (contoh: U 9° 41' 11,4")	Bujur (contoh: T 123° 30' 25,4")
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tahun berdiri:	<input type="text"/>
Dasar hukum pendirian:	<input type="checkbox"/> SK Menteri <input type="checkbox"/> SK Gubernur <input type="checkbox"/> SK Bupati <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: <input type="text"/>

### Habitat/ekosistem dalam KKL:

	<u>Persentase</u>		<u>Persentase</u>
<input type="checkbox"/> Bakau	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Pasut berbatu	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Muara/delta	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dasar berpasir	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Terumbu karang	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dasar lumpur	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Padang lamun	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Perairan terbuka	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Padang alga-besar	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Laut dalam	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lainnya	<input type="text"/>		

### Jenis terumbu karang:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Karang tepi   | <input type="checkbox"/> Karang penghalang | <input type="checkbox"/> Terumbu menara              |
| <input type="checkbox"/> Gosong karang | <input type="checkbox"/> Karang cincin     | <input type="checkbox"/> Terumbu lepas-pantai/beting |
| <input type="checkbox"/> Karang laguna |  |  |

### Tampilan khusus:

<input type="checkbox"/> Tinggalan sejarah, sebutkan.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan.	<input type="text"/>

### Species penting (a.l. species terancam):

<input type="text"/>
----------------------

## B. Tim Tinjauan Efektivitas Pengelolaan

No	NAMA	ORGANISASI	POSISI/ JABATAN	HUBUNGAN DENGAN KKL	RINCIAN KONTAK
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## C. Pengelolaan Keuangan KKL

### Sumber dukungan dana:

- Alokasi anggaran pemerintah  
 Organisasi Non-Pemerintah  
 Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

Anggaran tahunan KKL:	IDR	
Penerimaan kotor tahunan KKL:	IDR	
Biaya operasi per tahun:	IDR	

### Pengeluaran utama penyelenggaraan KKL? *(Pilih dan tambahkan yang sesuai)*

1. Gaji   
2. Program   
3. Pelatihan   
4. Lainnya: \_\_\_\_\_   
5. Lainnya: \_\_\_\_\_

## D. Penegakan Aturan KKL

### Undang-undang dan peraturan yang diacu untuk menegakkan aturan KKL:

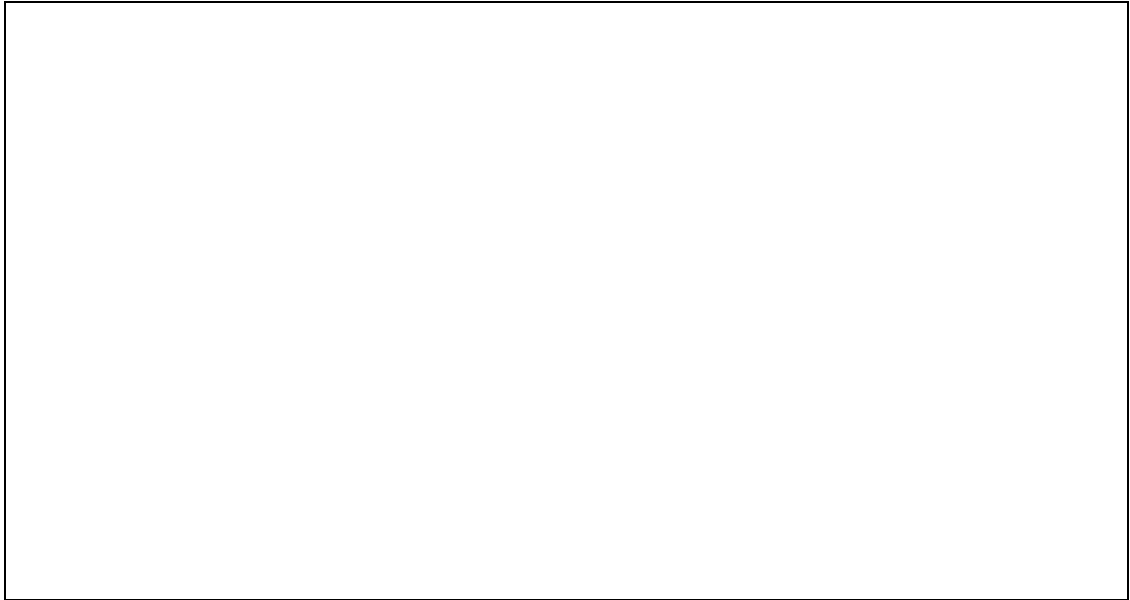
--

### Catatan tentang pelanggaran:

Bentuk pelanggaran	Tanggal kejadian	Hasil akhir (misal: didenda, ditahan, dibebaskan)

#### **E. Informasi Tambahan**

Setelah mengisi bagian selanjutnya (kartu skor), bila anda memiliki informasi tambahan atau relevan tentang KKL yang anda rasa perlu atau belum tertampung dalam lembar tinjauan ini, silahkan menyampaikannya pada boks di bawah ini. Bila ruang yang tersedia kurang, silahkan melampirkan kertas tambahan.



## Bagian 2: Kartu Skor Pengelolaan KKL

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel A	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data
				Y	T	TT	TA	
1.	B	IK	Apakah tapak KKL dipilih berdasarkan kriteria biofisik yang diidentifikasi melalui kajian garisdasar?					Laporan survei garisdasar tersedia. Judul & tanggal: [ _____ ] Letak: [ _____ ] Metoda untuk survei biofisik: [ _____ ]
2.	SE	IK	Apakah tapak KKL dipilih berdasarkan kriteria sosio-ekonomi yang diidentifikasi melalui kajian garisdasar?					Laporan survei garisdasar tersedia. Judul & tanggal: [ _____ ] Letak: [ _____ ] Metoda untuk survei sosioekonomi: [ _____ ]
3.	TK	IK	Apakah survei tapak dan/atau kajian garisdasar dilakukan secara kolaboratif dengan pihak/pemangku-kepentingan yang relevan?					Dokumen yang merinci para pihak/pemangku-kepentingan yang terlibat dalam survei/kajian tersedia. Letak: [ _____ ]
4.	SE	IK	Apakah survei garisdasar tentang penghidupan terkait-KKL masyarakat setempat sudah dilakukan?					Laporan survei penghidupan atau dokumen sejenis tersedia. Judul & tanggal: [ _____ ] Letak: [ _____ ]
5.	TK	IK	Apakah konsep KKL sudah dijelaskan kepada masyarakat dan pemerintah setempat?					Bila ditanya, kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah setempat dapat memberikan pemahaman tentang konsep KKL.
6.	SE	IK	Apakah analisis situasi untuk mengidentifikasi konflik dengan masyarakat atau pemangku-kepentingan setempat, bila ada, sudah dilakukan?					Laporan tersedia. Judul & tanggal: [ _____ ] Letak: [ _____ ]

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel A	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data
				Y	T	TT	TA	
7.	SE	IK	Apakah program edukasi untuk meningkatkan kepedulian tentang fungsi dan manfaat KKL sudah dimulai?					<p>Cantumkan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian tentang fungsi dan manfaat KKL:</p> <p>1. [ _____ ]</p> <p>2. [ _____ ]</p> <p>3. [ _____ ]</p>
8.	SE	IK	Apakah upaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat atau pemangku-kepentingan setempat melalui, misalnya, penguatan kapasitas, penghidupan alternatif, penjangkauan, sudah dilakukan, dan apakah kegiatan-kegiatan ini masih berjalan?*					<p>Cantumkan di sini kegiatan-kegiatan yang sudah/sedang dilakukan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan pemangku-kepentingan setempat:</p> <p>1. [ _____ ]</p> <p>2. [ _____ ]</p> <p>3. [ _____ ]</p>
9.	TK	IK	Apakah konsultasi publik sudah dilakukan?					<p>Notulen rapat konsultasi tersedia. Letak: [ _____ ]</p>
10.	TK	IK	Apakah badan pengelola sudah berdiri?					<p>Badan pengelola sudah didirikan dalam bentuk: <i>(pilih salah satu)</i></p> <p>[ ] Unit nasional (Taman Nasional)</p> <p>[ ] Unit nasional (Cagar Alam)</p> <p>[ ] Unit propinsi</p> <p>[ ] Unit kabupaten</p> <p>[ ] Kelompok swadaya masyarakat</p> <p>[ ] Badan pengelola kolaboratif antara sektor swasta, pemerintah dan kelompok masyarakat</p> <p>[ ] KKL dikelola oleh swasta/pribadi</p> <p>[ ] Kelompok kolaboratif masyarakat dan pemerintah</p> <p>[ ] Kelompok kolaboratif masyarakat, pemerintah &amp; LSM</p> <p>[ ] Kolaborasi antara LSM dengan pemerintah</p> <p>[ ] Kolaborasi antara masyarakat dan LSM</p> <p>Nama Badan Pengelola: [ _____ ]</p> <p>Tahun badan pengelola dibentuk: [ _____ ]</p> <p>Tahun badan pengelola aktif: [ _____ ]</p>

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel A	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data															
				Y	T	TT	TA																
11.	B	IK	Apakah badan pengelola menerima pelatihan dan penguatan kapasitas awal untuk menyelenggarakan KKL?					<p>Cantumkan pelatihan yang pernah diberikan (bila tabel di bawah tidak mencukupi, silahkan membuat daftar pada berkas terpisah):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama staf/ perwakilan pengelola</th> <th>Posisi pada Badan Pengelola</th> <th>Pelatihan yang diikuti (dan berapa lama?)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Nama staf/ perwakilan pengelola	Posisi pada Badan Pengelola	Pelatihan yang diikuti (dan berapa lama?)												
Nama staf/ perwakilan pengelola	Posisi pada Badan Pengelola	Pelatihan yang diikuti (dan berapa lama?)																					
12.	B	K	Apakah hasil survei garisdasar biofisik digunakan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang 'SMART' <sup>19</sup> bagi lingkungan biofisik yang ingin dilestarikan melalui KKL? (Misal: xx% habitat terumbu terpelihara; xx# sarang penyu per tahun; pengurangan cara-cara penangkapan ikan destruktif sebanyak xx% setiap tahun, dll.).					<p>Cantumkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut:</p> <p>[ _____ _____ ]</p>															
13.	SE	K	Apakah hasil survei garisdasar sosio-ekonomi digunakan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang 'SMART' bagi intervensi sosio-ekonomi yang ingin dicapai melalui KKL? (Misal: xx% penduduk dengan penghidupan alternatif terhadap cara tangkap destruktif pada tahun 20xx).					<p>Cantumkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut:</p> <p>[ _____ _____ ]</p>															
14.	TK	H	Apakah KKL ditunjuk/dicadangkan oleh pemerintah melalui sebuah Surat Keputusan (SK)?					<p>Cantumkan judul SK dan tanggal penerbitannya:</p> <p>[ _____ _____ ]</p>															

**Catatan:**

Y=Ya; T=Tidak; TT=Tidak Tahu; TA=Tidak Berlaku

Kat=kategori (B=biofisik; SE=sosio-ekonomi; TK=tata-kelola)

KK=kriteria konservasi (IK=kegiatan implementasi; K=keluaran; H=hasil; EK=efek konservasi)

<sup>19</sup>SMART = *Specific*/spesifik, *Measureable*/dapat diukur, *Attainable*/dapat dicapai, *Results-oriented*/berorientasi hasil & *Time bound*/terikat waktu



Semua jawaban 'Ya' (Y)	Semua jawaban 'Tidak' (T)	Semua jawaban 'Tidak Tahu' (TT)	Semua jawaban 'Tidak Berlaku' (TA)	Skor total diharapkan = jumlah total pertanyaan (14) – jumlah jawaban 'Tidak Berlaku'. Contoh: bila ada tiga jawaban 'TA' maka skor total yang diharapkan untuk Tabel A adalah $14 - 3 = 11$	
				Perhitungan persentase hasil = $(\text{Semua jawaban 'Ya' / Skor total yang diharapkan}) \times 100$ . Contoh: bila semua jawaban 'Ya' adalah 6, dan skor total yang diharapkan adalah 11, maka persentase hasil adalah: $(6 / 11) \times 100 = 54,5\%$	

**\*Catatan bagi peninjau:**

T#8 – yang dimaksud dengan “memperoleh dukungan dari masyarakat setempat dan para pemangku-kepentingan” adalah memperoleh dukungan afirmatif dari masyarakat dan pemangku-kepentingan setempat. Pada tingkat ini pertanyaan yang diajukan untuk mengukur sejauh mana upaya telah dibuat untuk memperoleh dukungan afirmatif tersebut. Pada tahapan kartu skor selanjutnya, dukungan afirmatif ini bisa diukur melalui beragam cara, meliputi sensus, pemantauan persepsi dan/atau survei opini publik.

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel B	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data								
				Y	T	TT	TA									
1.	TK	IK	Apakah masyarakat setempat terlibat dalam proses perencanaan KKL?					Notulen rapat/laporan proses perencanaan kolaboratif tersedia.								
2.	TK	IK	Apakah pemerintah setempat dilibatkan dalam proses perencanaan KKL?					Notulen rapat/laporan proses perencanaan kolaboratif tersedia.								
3.	TK	IK	Apakah aturan dan pedoman tentang KKL sudah dipasang pada tempat-tempat yang strategis agar masyarakat umum & setempat dapat melihat dan membacanya dengan mudah?*					Aturan & pedoman tentang KKL dipasang di tempat strategis: (sebutkan) [ _____ ]								
4.	B	IK	Apakah pemantauan biofisik secara teratur sudah dimulai?*					<p>Pedoman pemantauan tersedia. Komponen biofisik yang dipantau adalah (tambahkan baris bila diperlukan):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen biofisik*</th> <th>Periode pemantauan (misal: bulanan, tahunan, setiap 2 tahun, dll.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Empat, atau kurang, komponen biofisik prioritas yang sedang dipantau:*</p> <p>1. [ _____ ]</p> <p>2. [ _____ ]</p> <p>3. [ _____ ]</p> <p>4. [ _____ ]</p>	Komponen biofisik*	Periode pemantauan (misal: bulanan, tahunan, setiap 2 tahun, dll.)						
Komponen biofisik*	Periode pemantauan (misal: bulanan, tahunan, setiap 2 tahun, dll.)															

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel B	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data												
				Y	T	TT	TA													
5.	SE	IK	Apakah pemantauan terkait aspek sosial sudah dimulai?*					<p>Pedoman pemantauan tersedia. Komponen sosial yang dipantau adalah (tambahkan baris bila diperlukan):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen sosial*</th> <th>Periode pemantauan (misal: bulanan, tahunan, setiap 2 tahun, dll.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Komponen sosial*	Periode pemantauan (misal: bulanan, tahunan, setiap 2 tahun, dll.)										
Komponen sosial*	Periode pemantauan (misal: bulanan, tahunan, setiap 2 tahun, dll.)																			
6.	TK	K	Apakah tersedia anggaran dari pemerintah pusat atau daerah atau dari sumber-sumber lainnya bagi pengelola KKL?					<p>Anggaran total per tahun (dalam Rupiah): [ _____ ]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sumber pendanaan</th> <th>Jumlah</th> <th>Waktu pendanaan; dari tahun (xx) ke (xx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Sumber pendanaan	Jumlah	Waktu pendanaan; dari tahun (xx) ke (xx)									
Sumber pendanaan	Jumlah	Waktu pendanaan; dari tahun (xx) ke (xx)																		
7.	TK	K	Apakah rencana pengelolaan KKL sudah dibuat?					<p>Rencana Pengelolaan tersedia. Rentang waktu perencanaan dari tahun [_____] ke tahun [_____]. Judul: [ _____ ] Letak:[ _____ ]</p>												
8.	TK	K	Apakah pembuatan Rencana Pengelolaan KKL dilakukan bersama dengan semua pemangku-kepentingan kunci?					Notulen rapat/laporan tentang proses kolaboratif tersedia.												

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel B	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data												
				Y	T	TT	TA													
9.	TK	K	Apakah Rencana Pengelolaan KKL sudah <i>diterima</i> oleh masyarakat setempat?*					Dukungan dari masyarakat setempat tersedia (misal: korespondensi yang menunjukkan dukungan dari Kepala Desa)												
10.	TK	K	Apakah Rencana Pengelolaan KKL sudah <i>diterima</i> oleh pemerintah setempat?*					Dukungan dari pemerintah setempat tersedia (misal: SK dukungan terhadap Rencana Pengelolaan)												
11.	TK	K	Apakah KKL mempunyai Rencana Zonasi (baik sebagai bagian dari dokumen rencana KKL atau dibuat terpisah)?					<p>Rencana Zonasi tersedia.  Judul: [ _____ ]  Letak: [ _____ ]  Zonasi berdasarkan peraturan: (sebutkan)  [ _____ ]</p> <p>Rencana Zonasi meliputi zona-zona berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis zona (misal, Inti, Pemanfaatan Umum, Tradisional, dll.)</th> <th>Jumlah zona jenis ini dalam KKL</th> <th>Luasan dalam hektare setiap jenis zona dalam KKL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Data spasial SIG untuk semua zona tersedia?  [ ] Ya [ ] Tidak  Bila 'Ya' data spasial disimpan di (letak):  [ _____ ]</p>	Jenis zona (misal, Inti, Pemanfaatan Umum, Tradisional, dll.)	Jumlah zona jenis ini dalam KKL	Luasan dalam hektare setiap jenis zona dalam KKL									
Jenis zona (misal, Inti, Pemanfaatan Umum, Tradisional, dll.)	Jumlah zona jenis ini dalam KKL	Luasan dalam hektare setiap jenis zona dalam KKL																		
12.	TK	K	Apakah pelampung tambat, tanda dan/atau tanda batas sudah dipasang? (atau salah satu diantaranya)					<p>Jumlah dipasang &amp; maksud (tambah baris bila diperlukan):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah pelampung</th> <th>Maksud</th> <th>Lokasi (GPS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah pelampung	Maksud	Lokasi (GPS)	1			2			3		
Jumlah pelampung	Maksud	Lokasi (GPS)																		
1																				
2																				
3																				

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel B	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data
				Y	T	TT	TA	
13.	TK	K	Apakah prasarana sudah didirikan untuk menunjang pengelolaan KKL (misal, pos Jagawana, pos lapangan, kantor lapangan, dll.)?					Cantumkan semua prasarana yang sudah dibangun: 1. [ _____ ] 2. [ _____ ] 3. [ _____ ]
14.	TK	H	Apakah KKL sudah dinyatakan/dideklarasikan secara resmi dengan SK?					SK tersedia. Tahun dan nama SK (misal, Permen, Perda, Perkam): [ _____ ]

Catatan:

Y=Ya; T=Tidak; TT=Tidak Tahu; TA=Tidak Berlaku;

Kat=kategori (B=biofisik; SE=sosio-ekonomi; TK=tata-kelola);

KK=kriteria konservasi (IK=kegiatan implementasi; K=keluaran; H=hasil; EK=efek konservasi)

Semua jawaban 'Ya' (Y)	Semua jawaban 'Tidak' (T)	Semua jawaban 'Tidak Tahu' (TT)	Semua jawaban 'Tidak Berlaku' (TA)	Skor total diharapkan = jumlah total pertanyaan (14) – jumlah jawaban 'Tidak Berlaku'.	
				Perhitungan persentase hasil = (Semua jawaban 'Ya' / Skor total yang diharapkan) x 100.	

\*Catatan bagi Peninjau:

T#3 – contoh: sebuah papan informasi yang mudah dilihat/dibaca dipasang di tempat-tempat yang mudah dicapai; aturan & peraturan dalam bentuk buku, brosur, dll., juga memudahkan orang untuk memperoleh informasi yang relevan.

T#4(i) – aspek-aspek biofisik yang mungkin dipantau meliputi, misalnya, kesehatan terumbu karang, agregasi ikan memijah, kelimpahan species penting, struktur trofik, keragaman/kelimpahan/ukuran ikan, kepadatan bakau, kualitas air, pemucatan/penyakit karang, komposisi habitat bentik, rugositas, rekrutmen karang, liputan alga, pengamatan Cetacea, kegiatan bersarang penyu, dan lain-lain.

T#4(ii) – empat aspek atau kurang yang menjadi prioritas pemantauan adalah aspek-aspek biofisik yang dianggap memainkan peranan paling penting bagi keutuhan KKL. Di sini peninjau diminta untuk mengidentifikasi maksimum empat aspek biofisik yang menjadi prioritas Badan Pengelola (contoh: kesehatan terumbu, agregasi ikan memijah, kegiatan bersarang penyu, dan struktur komunitas bakau).

T#5 – aspek-aspek sosial yang mungkin dipantau meliputi, misalnya, persepsi masyarakat, pola pemanfaatan sumberdaya, penghidupan alternatif, kecenderungan sosio-ekonomi, analisis dampak sosial, pendidikan, dan lain-lain.

T#9 & 10 – yang dimaksud dengan *diterima* di sini adalah “hanya menerima dukungan dari masyarakat/pemerintah setempat” tetapi tidak berarti sudah *diadopsi*.

T#11 – bila diperlukan, silahkan memberi informasi lebih banyak tentang zonasi pada KKL anda pada Bagian 1 sub-bab E lembar tinjauan ini.

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel C	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data
				Y	T	TT	TA	
1.	TK	IK	Apakah Badan Pengelola aktif melaksanakan/menindaklanjuti Rencana Pengelolan?					Laporan Tahunan berisi capaian dan analisis untuk mencapai tujuan dan sasaran tersedia.
2.	TK	IK	Apakah peluang bagi pendanaan berkelanjutan sudah dipertimbangkan?					Beberapa bentuk analisis pilihan pendanaan berkelanjutan tersedia (misal: makalah kajian, analisis kelayakan, dll.)
3.	TK	IK	Apakah tersedia cara bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan keluhan/persoalan (bila relevan) kepada Badan Pengelola?					Cantumkan cara yang digunakan: [ _____ ]
4.	B	IK	Apakah hasil pemantauan biofisik (pengukuran komponen yang tercantum pada T#4 Tabel B) sudah dianalisis untuk mengetahui kecenderungan/tren tentang kondisinya?					Laporan pemantauan dengan analisis yang sesuai tersedia.
5.	SE	IK	Apakah hasil pemantauan komponen sosial (pengukuran komponen yang tercantum pada T#5 Tabel B) sudah dianalisis untuk mengetahui kecenderungan/tren perubahan berdasarkan waktu?					Laporan pemantauan dengan analisis yang sesuai tersedia.
6.	TK	IK	Apakah kelompok untuk menegakkan aturan KKL (misal, patroli) sudah terbentuk?					Kelompok penegak aturan KKL terbentuk dan terdiri dari organisasi/badan/kelompok masyarakat sebagai berikut (sebutkan): [ _____ ] [ _____ ]
7.	TK	IK	Apakah kegiatan penegakan aturan KKL dilakukan secara teratur?					Cantumkan rencana/jadual penegakan aturan KKL: [ _____ ]
8.	TK	K	Apakah pengadilan setempat memperoleh informasi/ pelatihan yang diperlukan untuk mendukung perannya dalam setiap upaya tuntutan hukum terkait KKL?*					Laporan/dokumentasi tentang pelatihan yang diberikan kepada pihak pengadilan setempat tersedia.
9.	TK	K	Apakah semua papan informasi, tanda batas dan pelampung tambat masih berada di tempatnya masing-masing dan terpelihara?					Rencana jadual pemeliharaan tersedia [ ] Informasi tentang persyaratan kepatuhan dan upaya penegakan aturan KKL bagi masyarakat baik di dalam mau pun luar kawasan tersedia [ ]

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel C	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data
				Y	T	TT	TA	
10.	TK	H	Apakah Rencana Zonasi KKL sudah <i>diterima</i> oleh masyarakat setempat?*					Bukti Rencana Zonasi KKL diterima oleh masyarakat setempat terlampir dalam bentuk: [ _____ ] (Contoh: surat-menyurat pemberian dukungan dari, misalnya, Kepala Desa dan pemangku-kepentingan, dll.)
11.	TK	H	Apakah Rencana Zonasi KKL sudah <i>diterima</i> oleh pemerintah setempat?*					Bukti Rencana Zonasi KKL diterima oleh pemerintah setempat terlampir dalam bentuk: [ _____ ] (Contoh: SK yang menunjukkan pemberian dukungan dari pemerintah setempat/daerah, dll.)
12.	TK	H	Apakah Rencana Pengelolaan KKL sudah <i>diadopsi</i> oleh masyarakat setempat?*					Bukti adopsi Rencana Pengelolaan KKL oleh masyarakat setempat terlampir dalam bentuk: [ _____ ] (Contoh: hasil pemantauan persepsi; perubahan perilaku pemanfaatan sumberdaya, dll.)
13.	TK	H	Apakah Rencana Pengelolaan KKL sudah <i>diadopsi</i> oleh pemerintah setempat?*					Bukti adopsi Rencana Pengelolaan KKL oleh pemerintah setempat terlampir dalam bentuk: [ _____ ] (Contoh: perubahan pada sistem perijinan perikanan; peningkatan upaya penerapan hukum pada kasus-kasus terkait KKL, dll.)
14.	TK	H	Apakah KKL digunakan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan? (perpanjang daftar sesuai kebutuhan)					Proyek penelitian yang (sudah) dilakukan: 1. [ _____ ] 2. [ _____ ]  Kegiatan pendidikan yang (sudah) dilakukan: 1. [ _____ ] 2. [ _____ ]

Catatan:

Y=Ya; T=Tidak; TT=Tidak Tahu; TA=Tidak Berlaku

Kat=kategori (B=biofisik; SE=sosio-ekonomi; TK=tata-kelola)

KK=kriteria konservasi (IK=kegiatan implementasi; K=keluaran; H=hasil; EK=efek konservasi)

Semua jawaban 'Ya' (Y)	Semua jawaban 'Tidak' (T)	Semua jawaban 'Tidak Tahu' (TT)	Semua jawaban 'Tidak Berlaku' (TA)	Skor total diharapkan = jumlah total pertanyaan (14) - jumlah jawaban 'Tidak Berlaku'.	
				Perhitungan persentase hasil = (Semua jawaban 'Ya' / Skor total yang diharapkan) x 100.	

\*Catatan bagi Peninjau:

T#8 - pelatihan ini dapat diberikan baik oleh Badan Pengelola sendiri atau badan pemerintah lainnya atau oleh mitra.

T#10 & 11 - yang dimaksud dengan *diterima* di sini adalah "hanya menerima dukungan dari masyarakat/pemerintah setempat" tetapi tidak berarti sudah *diadopsi*.

T#12 & 13 - yang dimaksud dengan *diadopsi* di sini adalah "masyarakat/pemerintah setempat menggunakan Rencana Pengelolaan sebagai acuan bagi proses pengambilan-keputusan dan melakukan kegiatan sehari-hari"



T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel D	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data
				Y	T	TT	TA	
1.	TK	K	Apakah KKL memiliki rencana pendanaan berkelanjutan?					Rencana Pendanaan Berkelanjutan tersedia. Pendanaan berkelanjutan bagi KKL akan tersedia mulai tahun: [ _____ ]
2.	TK	H	Apakah Rencana Zonasi KKL sudah <i>diadopsi</i> oleh masyarakat setempat?*					Bukti adopsi Rencana Zonasi KKL oleh masyarakat setempat terlampir dalam bentuk: [ _____ ] (Contoh: hasil pemantauan persepsi; perubahan perilaku pemanfaatan sumberdaya, dll.)
3.	TK	H	Apakah Rencana Zonasi KKL sudah <i>diadopsi</i> oleh pemerintah setempat?*					Bukti adopsi Rencana Zonasi KKL oleh pemerintah setempat terlampir dalam bentuk: [ _____ ] (Contoh: perubahan pada sistem perijinan perikanan; peningkatan upaya penerapan hukum pada kasus-kasus terkait KKL, dll.)
4.	TK	H	Apakah sistem penegakan aturan/peraturan yang didirikan berfungsi secara penuh?					Pelanggaran yang terjadi: ( <i>daftarkan dengan susunan 1 = penyebab paling sering, ke 5 = penyebab paling jarang</i> ) [ ] Nelayan menggunakan peralatan yang diijinkan, di kawasan yang diperbolehkan, tetapi tanpa ijin yang sesuai [ ] Nelayan dengan alat yang diijinkan tetapi bersifat merusak dan tidak diijinkan pemakainnya dalam KKL [ ] Nelayan dari luar menangkap dalam kawasan pemanfaatan tradisional (zona dalam KKL) [ ] Nelayan melakukan kegiatan di Zona/Kawasan Larang Ambil (Z/KLA) [ ] Nelayan menggunakan cara-cara ilegal seperti bom, racun sianida, potas, dan lain-lain.
5.	TK	H	Apakah Zona/Kawasan Larang Ambil (Z/KLA) termasuk yang dipatroli?					Laporan kegiatan patroli tersedia.

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel D	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data
				Y	T	TT	TA	
6.	TK	H	Apakah pemantauan menunjukkan bahwa para pemangku-kepentingan setempat mengetahui/peduli bahwa kegiatan ekstraktif di dalam Zona/Kawasan Larang Ambil adalah dilarang?					Laporan Pemantauan yang tersedia mencantumkan persentase pemangku-kepentingan setempat yang peduli bahwa praktik ekstraktif dilarang di Zona/Kawasan Larang Ambil. Persentase: [_____]%
7.	SE	H	Apakah pemantauan menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat setempat kini terhadap sumberdaya dalam KKL semakin berkurang bila dibandingkan dengan sebelum KKL didirikan?					Laporan analisis penghidupan tersedia.
8.	B	H	Apakah hasil analisis pemantauan biofisik digunakan untuk membuat rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan/tata-kelola/perencanaan dan intervensi terkait?					Cantumkan contoh-contoh dimana hasil pemantauan digunakan untuk melaksanakan pengelolaan adaptif: [_____]
9.	SE	H	Apakah hasil analisis pemantauan komponen sosial digunakan untuk membuat rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan/tata-kelola/perencanaan dan intervensi terkait?					Cantumkan contoh-contoh dimana hasil pemantauan digunakan untuk melaksanakan pengelolaan adaptif: [_____]
10.	TK	EK	Apakah kejadian praktik perikanan yang merusak dan ilegal dalam kawasan KKL kini berkurang bila dibandingkan dengan sebelum KKL didirikan?					Survei menunjukkan praktik merusak dan ilegal menurun dari tingkat [_____] pada tahun [_____] ke tingkat [_____] pada tahun [_____]
Sejak KKL didirikan, apakah empat komponen biofisik prioritas yang dipantau dalam KKL stabil dan/atau menunjukkan perbaikan kondisi (berdasarkan daftar yang disajikan pada T#4 Tabel B)*								
11.	B	EK	Komponen biofisik prioritas 1: [_____] - kondisinya stabil dan/atau membaik.					Laporan pemantauan tersedia. Judul & tanggal: [_____] Letak: [_____]
12.	B	EK	Komponen biofisik prioritas 2: [_____] - kondisinya stabil dan/atau membaik.					Laporan pemantauan tersedia. Judul & tanggal: [_____] Letak: [_____]
13.	B	EK	Komponen biofisik prioritas 3: [_____] - kondisinya stabil dan/atau membaik.					Laporan pemantauan tersedia. Judul & tanggal: [_____] Letak: [_____]

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel D	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data
				Y	T	TT	TA	
14.	B	EK	Komponen biofisik prioritas 4: [ _____ ] - kondisinya stabil dan/atau membaik.					Laporan pemantauan tersedia. Judul & tanggal: [ _____ ] Letak: [ _____ ]

Catatan:

Y=Ya; T=Tidak; TT=Tidak Tahu; TA=Tidak Berlaku

Kat=kategori (B=biofisik; SE=sosio-ekonomi; TK=tata-kelola)

KK=kriteria konservasi (IK=kegiatan implementasi; K=keluaran; H=hasil; EK=efek konservasi)

Semua jawaban 'Ya' (Y)	Semua jawaban 'Tidak' (T)	Semua jawaban 'Tidak Tahu' (TT)	Semua jawaban 'Tidak Berlaku' (TA)	Skor total diharapkan = jumlah total pertanyaan (14) – jumlah jawaban 'Tidak Berlaku'.	
				Perhitungan persentase hasil = (Semua jawaban 'Ya' / Skor total yang diharapkan) x 100.	

\*Catatan bagi Peninjau:

T#2 & 3 – yang dimaksud dengan *diadopsi* di sini adalah “masyarakat/pemerintah setempat menggunakan Rencana Pengelolaan sebagai acuan bagi proses pengambilan-keputusan dan melakukan kegiatan sehari-hari”

T#11, 12, 13 & 14 – empat prioritas ini diidentifikasi pada pertanyaan nomor 4 pada Tabel B sebagai komponen-komponen biofisik (sangat) penting bagi keutuhan KKL.

**Penghitungan Efek Konservasi**

Jumlah total pertanyaan EK pada Tabel D	Total 'Ya' Terekam	Total 'Tidak' Terekam	Total 'Tidak Tahu' Terekam	Total 'Tidak Berlaku' Terekam
5				

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel E	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data
				Y	T	TT	TA	
1.	TK	IK	Apakah Rencana Pengelolaan KKL ditinjau-ulang secara teratur, dan dimutakhirkan dan dipertajam dalam rangka menunjang pengelolaan adaptif?					Laporan Tinjauan tersedia. Bila ada, Rencana Pengelolaan secara kronologis tersedia dan/atau perubahan pada dokumen Rencana Pengelolaan yang menunjukkan penajaman pendekatan secara mewartu.
2.	TK	IK	Apakah strategi atau program perluasan untuk mendukung keterhubungan dengan KKL lain yang berdekatan dan/atau jejaring di kawasan sekitar sudah dimulai?					Rencana/proposal berjejaring tersedia.
3.	TK	K	Apakah lebih dari 80% staf Badan Pengelola terlatih dengan baik untuk memenuhi kompetensi dan tugas yang dipersyaratkan?					Penilaian staf dan laporan kemajuan/pemantauan/hasil evaluasi pasca-pelatihan tersedia.
4.	TK	H	Apakah Rencana Zonasi KKL terintegrasi penuh dengan proses perencanaan tata-ruang badan-badan pemerintah setempat & nasional?					Laporan atau SK resmi tersedia.
5.	TK	H	Apakah kajian menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan KKL merupakan bagian tak-terpisahkan dari pembangunan ekonomi setempat/daerah?					Laporan atau analisis penghidupan tersedia.
6.	TK	H	Apakah pemerintah setempat/daerah berketetapan untuk menjamin keberlanjutan KKL?					Laporan atau SK resmi tersedia.
7.	B	H	Apakah telah dilakukan analisis untuk menentukan luasan dan dampak layanan ekosistem KKL yang secara efektif lestari?					Analisis layanan ekosistem tersedia.
8.	TK	H	Apakah sistem pendanaan berkelanjutan bagi KKL sudah berjalan secara penuh dan mencapai sarannya?					Laporan pendanaan tersedia.

T#	Kat	KK	Pertanyaan – Tabel E	Jawaban				Indikator & Pengumpulan Data												
				Y	T	TT	TA													
9.	B	EK	Apakah tujuan dan sasaran yang diidentifikasi pada Rencana Pengelolaan KKL sudah tercapai sepenuhnya, dan/atau mencapai 80% (menurut hasil pemantauan/ survei/kajian)?					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tujuan/sasaran tercantum pada Rencana Pengelolaan</th> <th>Pencapaian saat ini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Tujuan/sasaran tercantum pada Rencana Pengelolaan	Pencapaian saat ini										
Tujuan/sasaran tercantum pada Rencana Pengelolaan	Pencapaian saat ini																			
10.	TK	EK	Apakah ancaman terhadap KKL sudah berkurang dengan nyata (turun lebih dari 80%)?					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancaman terhadap KKL</th> <th>Penghentian tercapai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Ancaman terhadap KKL	Penghentian tercapai (%)										
Ancaman terhadap KKL	Penghentian tercapai (%)																			
11.	TK	EK	Apakah kegiatan-kegiatan merusak dan ilegal dalam KKL berkurang nyata atau berhasil dihentikan?					Laporan yang menunjukkan hasil pemantauan dan bukti-bukti pengurangan/penghentian praktik merusak dan ilegal tersedia.												
12.	TK	EK	Apakah praktik ekstraktif dalam Zona/Kawasan Larang Ambil KKL sudah efektif dihentikan?					Laporan Pemanfaatan Sumberdaya yang menunjukkan penghentian praktik ekstraktif dalam Zona/Kawasan Larang Ambil tersedia.												
13.	TK	EK	Ketika (bila) ada tuntutan terhadap pelanggaran aturan KKL, apakah staf pengadilan dapat menjalankan prosesnya sesuai prosedur secara efisien dan menghasilkan (hukuman)?					Bukti pernyataan yang menunjukkan tindak tuntutan yang efisien dan menghasilkan tersedia.												
14.	SE	EK	Apakah program-program pendidikan dan penjangkauan direncanakan dan didanai secara berkelanjutan untuk jangka-panjang dalam Rencana Pengelolaan?					Rencana jangka-panjang bagi program-program pendidikan dan penjangkauan tersedia.												

Catatan:

Y=Ya; T=Tidak; TT=Tidak Tahu; TA=Tidak Berlaku

Kat=kategori (B=biofisik; SE=sosio-ekonomi; TK=tata-kelola)

KK=kriteria konservasi (IK=kegiatan implementasi; K=keluaran; H=hasil; EK=efek konservasi)

Semua jawaban 'Ya' (Y)	Semua jawaban 'Tidak' (T)	Semua jawaban 'Tidak Tahu' (TT)	Semua jawaban 'Tidak Berlaku' (TA)	Skor total diharapkan = jumlah total pertanyaan (14) - jumlah jawaban 'Tidak Berlaku'.	
				Perhitungan persentase hasil = (Semua jawaban 'Ya' / Skor total yang diharapkan) x 100.	

**Penghitungan Efek Konservasi**

Jumlah total pertanyaan EK pada Tabel E	Total 'Ya' Terekam	Total 'Tidak' Terekam	Total 'Tidak Tahu' Terekam	Total 'Tidak Berlaku' Terekam
6				

# Tinjauan Efektivitas Pengelolaan KKL: Hasil Akhir Kartu Skor

[Salinan-lunak buku-kerja MS-Excel untuk “Tinjuan Efektivitas Pengelolaan KKL: Hasil Akhir Kartu Skor” ini dibuat dan dikembangkan oleh I Nyoman Suardana/TNC-IMP]





## Menghitung “Efek Konservasi”

Salinlah hasil akhir dari Tabel D dan E ke tabel di bawah ini.

Tabel	Jumlah total pertanyaan EK pada tabel	Total ‘Ya’ Terekam	Total ‘Tidak’ Terekam	Total ‘Tidak Tahu’ Terekam	Total ‘Tidak Berlaku’ Terekam
D	5				
E	6				
<b>Total</b>	<b>11</b>				

### *Jumlah Total Hasil yang Diharapkan*

Jumlah pertanyaan EK (11) dikurangi jumlah jawaban ‘Tidak Berlaku’

$$11 - \_ = \_$$

### *Penghitungan peringkat EK*

Jumlah total jawaban ‘Ya’ ÷ Jumlah total ‘yang Diharapkan’ (di atas) x 100

$$(\_ \div \_) \times 100 = \_ \%$$

## HASIL

Berdasarkan perhitungan di atas, Tingkat Pengelolaan KKL anda adalah:

**Tingkat Pengelolaan: \_\_\_\_\_**

Ini berarti KKL anda adalah (tandai salah satu kotak yang sesuai di bawah ini)

Tingkat	KKL	Hasil
1	Dimulai	
2	Dikelola secara minimum	
3	Dikelola dengan penegakan aturan	
4	Dikelola secara berkelanjutan	
5	Dikelola dengan kelembagaan berfungsi penuh	

Berdasarkan perhitungan di atas, peringkat Efek Konservasi dari KKL anda adalah: (beri tanda pada salah satu kotak yang sesuai di bawah ini)

Peringkat	Uraian	Hasil
1	Efek Konservasi belum terukur atau teramati, atau teramati pada kurang dari seperempat (<25%) bidang-bidang efek yang diketahui.	
2	Efek Konservasi terukur atau teramati pada lebih dari seperempat (>25%) tetapi kurang dari sebagian (<50%) bidang-bidang efek yang diketahui.	
3	Efek Konservasi terukur atau teramati pada lebih dari setengah (>50%) tetapi kurang dari tiga perempat (<75%) bidang-bidang efek yang diketahui.	
4	Efek Konservasi terukur atau teramati pada lebih dari tiga perempat (>75%) bidang-bidang efek yang diketahui.	

Berarti peringkat Efek Konservasi KKL anda adalah:

**Peringkat Efek Konservasi: \_\_\_\_\_**

\*\*\*\*\* SELAMAT \*\*\*\*\*

**ANDA/TIM PENINJAU TELAH SELESAI MELENGKAPI TINJAUAN  
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KKL**

Beberapa catatan akhir:

- Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada Panduan, maka kini saatnya untuk memeriksa kembali semua pertanyaan dengan jawaban 'Tidak' dan 'Tidak Tahu'.
- Perlu diingat bahwa tidak ada jawaban benar/salah dalam tinjauan efektivitas pengelolaan KKL ini, tetapi tinjauan dimaksudkan untuk memberikan kepada anda, tim peninjau, informasi tentang pada aspek-aspek apa sajakah pengelolaan KKL berjalan dengan baik, aspek-aspek yang memerlukan lebih banyak masukan, bidang-bidang apa sajakah yang relevan dengan KKL yang dikaji, dan apa yang perlu dilakukan pada waktu (bulan/tahun) yang akan datang.
- Hasil ini juga memberikan kepada anda dan tim peninjau bahan pembandingan yang sah bagi tinjauan yang akan dilakukan pada dua atau tiga tahun ke depan.
- Untuk berbagi hasil dan pengalaman meninjau efektivitas pengelolaan KKL yang anda/tim peninjau kaji, tolong kirim hasilnya ke laman: <http://mpames.coraltrianglecenter.org/>



**Panduan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (EPKKL) di Indonesia** menyajikan sebuah perangkat sederhana sekaligus kompak untuk mengkaji bagaimana suatu KKL memenuhi peran-peran pengelolaannya sekaligus mencapai tujuan-tujuan konservasinya. Panduan ini dikembangkan agar mudah diadaptasikan dan dimaksudkan untuk dapat digunakan untuk mengkaji setiap KKL yang berada dimanapun di dalam wilayah Indonesia, pada skala yang berbeda-beda dan dengan mekanisme tata-kelola yang juga beragam. Selain untuk memberikan cara yang mudah untuk mengkaji kemajuan atau masalah yang dihadapi oleh suatu KKL, Panduan ini juga merupakan sebuah perangkat pembelajaran bagi pengelolaan adaptif. Panduan ini memberikan proses sederhana bagi para perencana, pengelola, pemangku-kepentingan KKL dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, untuk menentukan hal-hal apa sajakah yang sudah dicapai oleh sebuah KKL dan hal-hal apa sajakah yang belum atau perlu lebih diperhatikan demi mencapai pengelolaan KKL yang lebih efektif.